



Kedutaan Besar  
Republik Indonesia  
Brussel

EDISI 2021 NO. 2

# RESEARCH SERIES

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA IN BRUSSELS

## MERESPON POTENSI EKONOMI PASAR PRODUK PERIKANAN EROPA DAN TUNTUTAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN;

Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas  
Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia  
yang Berkelanjutan

---





# **Merespon Potensi Ekonomi Pasar Produk Perikanan Eropa dan Tuntutan Perlindungan Lingkungan; *Kajian Strategi Peningkatan Kapasitas Sektor Perikanan dan Kelautan Indonesia yang Berkelanjutan***

**Disusun oleh:**

- 1) Kezia Eka Sari Dewi, S.T., Ma.H.S., mahasiswa program doktoral, KU Leuven, Belgia.
- 2) Anton Abdul Fatah, S.A.B.,M.P.A, mahasiswa program doktoral, KU Leuven, Belgia.

**Pendamping:**

Muhamad Mufti Arkan SE, Ak., M.Acc,  
Atase Keuangan KBRI Brussels

**Kontributor dan Editor:**

Atase Keuangan KBRI Brussel

© 2021

# ● Ikhtisar Utama

Indonesia adalah produsen produk perikanan nomor 2 di dunia setelah China. Hasil perikanan dan hasil industri perikanan Indonesia menyumbang 2,6% dari produk domestik bruto Indonesia. Selain ikan hasil tangkap, budidaya perikanan menyumbang hasil produksi sekitar dua pertiga produksi perikanan Indonesia. Volume hasil perikanan Indonesia dalam periode 2017 s.d. 2018 meningkat sebesar 4,45%. Saat ini Indonesia merupakan produsen ikan tuna (tangkap alam) terbesar di dunia. Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai produsen udang dan lobster dunia. Di pasar global, Indonesia menyumbang 7% produksi ikan tangkap di seluruh dunia.

Ikan merupakan salah satu sumber protein utama yang cukup penting bagi masyarakat di Eropa. Saat ini, konsumsi ikan per kapita di Eropa sebesar 24.3kg. Dari sisi jenis spesies konsumsi ikan, penduduk di Eropa menyantap cukup tinggi ikan tuna yang sudah diproses dalam bentuk pengalangan (*canned*). Data dari EUMOFA, pada tahun 2017 angka konsumsi ikan tuna per kapita di Eropa bahkan mencapai 3,07 kg per capita per tahun. Angka ini bahkan lebih besar dari tiga jenis ikan lainnya yang diproduksi di Eropa, antara lain cod (2.31kg/kapita), salmon (2.24kg/kapita), dan alaska pollock (1.59kg/kapita). Untuk memenuhi kebutuhan ikan Eropa, Uni Eropa sendiri mengusahakan dengan berbagai usaha peningkatan produksi, namun dengan tetap memperhitungkan faktor keberlanjutan dan proteksi terhadap populasi ikan.

Dilandasi pertimbangan terbatasnya sumber daya alam kelautan ini, maka Uni Eropa memiliki berbagai kebijakan untuk mengatur laut dan memastikan agar industri perikananannya tidak mengancam kelestarian lingkungan. Kebijakan Uni Eropa mengenai perikanan yang pertama yaitu *the Common Fisheries Policies* (CFP) yang mengatur kesepakatan mengenai volume penangkapan ikan yang berkelanjutan, antara lain rujukan jenis ikan yang boleh ditangkap dari alam serta bagaimana prosedur yang harus dilakukan bilamana menangkap ikan yang tidak memenuhi syarat untuk ditangkap. CFP juga mengatur hak transparansi informasi bagi konsumen khususnya terkait asal usul produk (ikan tangkapan atau

ikan budidaya), area produksi/tangkapan, tanggal kadaluarsa produk, serta kandungan gizi. Uni Eropa juga membangun sistem *European Maritime and Fisheries Fund* (EMFF) yang salah satu tujuannya mengatur mengenai pendanaan bagi program-program perikanan sehingga nelayan di Eropa secara perlahan bisa mengikuti transisi dari kegiatan perikanan tradisional menuju ke kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap alam lingkungan. Eropa juga menegakan mekanisme pengawasan secara ketat melalui *EU's fisheries control system* yang salah satunya memastikan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan industri perikanan yang telah ditetapkan dipatuhi oleh negara-negara anggota, serta menjadi jembatan antara negara anggota dengan Uni Eropa. Terakhir, Eropa juga membangun berbagai perjanjian kerja sama dengan negara di luar Uni Eropa, baik pada tataran bilateral, multilateral, maupun regional guna menjaga rantai pasokan produk perikanan serta menjaga sustainabilitas lingkungan.

Pada beberapa tahun terakhir, Brexit bagi Uni Eropa dan Inggris juga menjadi tantangan baru. Masalah pada sektor perikanan hanyalah sebagian kecil dari tantangan pasca Brexit, termasuk aneka kesepakatan lainnya yang masih harus dirundingkan antara kedua belah pihak. Kesulitan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat terkait isu ini menjadikan perundingan terlambat selama hampir empat tahun sejak 2016. Hingga tulisan ini dibuat pada tanggal 25 Desember 2020, kesepakatan yang terjadi baru pada tingkat Perdana Menteri Inggris dengan Presiden Uni Eropa. Kesepakatan tingkat ini masih memerlukan beberapa tahapan pembahasan lanjutan di kedua belah pihak, antara lain di tataran parlemen masing-masing, sehingga masih dapat terus bergerak dan dimungkinkan adanya perubahan disertai beberapa penyesuaian. Hal tersebut sangat dimungkinkan, terlebih mengingat adanya ketidakpuasan dari komunitas nelayan di beberapa negara yang terdampak langsung.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Wageningen University mengestimasi bahwa BREXIT, termasuk kesepakatan perdagangan antara UK dan Uni Eropa, tidak akan terlalu ber-

pengaruh pada produksi ikan secara global (Bartelings & Kristkova, 2018). Mengingat kepekatan BREXIT, khususnya terkait perikanan, diestimasi tidak akan terlalu mempengaruhi produksi ikan global, maka dampak tersebut tentunya tidak akan banyak berpengaruh pada rantai produksi kelautan dan perikanan di Indonesia. Namun demikian, pergerakan dan perubahan pasar perikanan di Eropa, termasuk pasca Brexit, harus selalu dilihat sebagai peluang dan dioptimalkan kesempatannya oleh para pelaku industri sektor ini di tanah air.

Khusus kerjasama perdagangan dengan Indonesia, sampai saat ini telah dilakukan perundingan hingga tahap ke-10 terkait *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia. Didalam CEPA tersebut, terdapat banyak komoditas, termasuk diantaranya komoditas di bidang maritim, perikanan dan budidaya perikanan. Namun demikian, luasnya cakupan perjanjian ini menjadi permasalahan tersendiri, mengingat Uni Eropa dan Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam banyak hal, seperti nilai-nilai terkait perlindungan warga sipil, transparansi, dan komitmen terhadap perlindungan alam.

Masih besarnya peluang potensi pasar eropa untuk komoditas perikanan dan kelautan mendorong makalah ini untuk menyusun kajian analisa SWOT terkait potensi sektor ini di tanah air. Dalam hal kekuatan (*strengths*), Indonesia sangat diuntungkan dengan anugerah sebagai negara maritim yang sangat mendukung untuk produksi sektor perikanan dan kelautan. Sekitar satu pertiga spesies ikan di dunia diyakini berada di wilayah perairan Indonesia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, ikan-ikan karang, udang, lobster, aneka ragam kerang, berbagai jenis ikan hias, dan rumput laut. Disamping itu, Indonesia juga memiliki kekuatan potensi lahan budidaya yang sangat luas disertai iklim tropis yang cukup stabil dibandingkan dengan negara lain seperti Eropa yang memiliki empat musim. Terakhir, besarnya penduduk Indonesia, baik sebagai produsen maupun konsumen, merupakan potensi luar biasa untuk mendukung produksi produk perikanan dan kelautan.

Dari sisi peluang, saat ini terdapat estimasi ikan dan produk kelautan yang boleh ditangkap sekitar 10 juta ton per tahun dan 12.5 juta potensi yang ada. Data yang kami temukan memperlihatkan bahwa produksi ikan tangkap Indonesia, sebagai negara dengan luas perairan yang sangat besar masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain dengan luar perairan yang lebih sedikit. Selain peluang komoditas tangkap, dari sisi budidaya Indonesia juga dinilai cukup kuat mengingat besarnya dukungan potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yang mencapai hingga 2,8 juta ha untuk lahan budidaya air tawar, 2,96 juta ha untuk lahan budidaya air payau, dan 12,12 juta ha lahan budidaya laut. Namun demikian, saat ini cakupan luas lahan untuk budidaya masih belum optimal, terlihat dari angka yang hanya mencapai 316.446 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya air tawar, 605.909 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya tambak, dan 278.920 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya laut. Peningkatan sektor budidaya tersebut sangat penting mengingat untuk Indonesia, tren perkembangan produksi budidaya terlihat semakin jauh tertinggal, khususnya dari negara-negara di kawasan asia timur dan pasifik. Peluang lain dari sisi permodalan juga terlihat dari besarnya ruang kredit perbankan yang belum semangat menyentuh sektor kelautan dan perikanan, karena masih di bawah 1% dari total kredit nasional, dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah. Khusus terkait dengan peluang pasar perikanan dan kelautan di Eropa, potensi terbesar bagi Indonesia adalah ekspor tuna, udang, dan lobster. Uni Eropa memiliki perjanjian terkait perikanan dengan negara berkembang, utamanya untuk tuna. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan tuna di Uni Eropa cukup besar, yang semestinya dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Dari sisi jenis spesies konsumsi ikan, penduduk di Eropa menyantap cukup tinggi ikan Tuna yang sudah diproses dalam bentuk pengalengan (*canned*).

Namun demikian, Indonesia juga masih memiliki beberapa kelemahan pada sektor kelautan dan perikanan. Kelemahan pertama adalah dominasi yang sangat tinggi, hingga 99%, dari nelayan tradisional skala kecil untuk ikan tangkap serta UMKM untuk budidaya sehingga kemampuan jelajah perahu sangat terbatas, tonase tangkap kecil (hanya 1% di atas 30 GT), serta kapasitas produksi yang relatif sangat rendah. Dari sisi kelem-

bagaan, hingga 2018 perusahaan penangkapan yang sudah resmi terdaftar baru mencapai 127 perusahaan, yang terdiri atas PMA sebanyak 3 perusahaan, PMDN sebanyak 88 perusahaan dan jenis lainnya sebanyak 36 perusahaan. Demikian halnya untuk sektor budidaya, hingga tahun 2018 baru terdapat 258 perusahaan budidaya perikanan yang secara resmi sudah terdaftar, yang terdiri atas 126 perusahaan budidaya tambak, 73 perusahaan pembenihan, 45 untuk budidaya laut, dan 14 untuk budidaya tawar. Kelemahan minimnya registrasi serta kelembagaan perusahaan ini tentu menghasilkan beberapa kendala, antara lain kesulitan akses terhadap perbankan untuk permodalan, termasuk optimalisasi fasilitas finansial dan perpajakan yang terus diupayakan oleh Pemerintah. Kelemahan terakhir yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah sedikitnya jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 538 pelabuhan perikanan. Namun demikian, berbagai temuan ahli menyampaikan bahwa kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia masih memerlukan sentuhan serius banyak pihak guna mendukung tata niaga perikanan sehingga produk perikanan dan kelautan di Indonesia dapat menjaga kualitas produknya serta dapat memenuhi standar pengiriman yang layak secara global, seperti akses penyediaan kebutuhan listrik secara mencukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin (*cold storage*, *ice flake machine*, dan kebutuhan lainnya).

Dari sisi ancaman, tingginya *illegal fishing* dan *destructive fishing*, khususnya oleh nelayan asing tampaknya masih marak di perairan Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi karena antara lain dua faktor. Faktor kesatu dan yang paling utama yaitu masih sedikitnya kapal ikan Indonesia di atas >30 GT yang beroperasi di *fishing grounds* yang selama ini dijarah nelayan asing. Adapun faktor kedua adalah lemahnya *law enforcement* dari aparat penegak hukum dan instansi terkait di Indonesia. Ekosistem ikan atau komoditas tertentu juga kini dalam status *over exploited* pada beberapa wilayah di tanah air. Terakhir, Indonesia juga cukup terancam secara langsung oleh perubahan iklim serta degradasi ekosistem kelautan. Sebagai contoh, dari 12.887 desa atau kelurahan maritim di Indonesia, hanya 53.1% yang memiliki hutan mangrove di pesisir wilayahnya

(BPS, 2019; data PODES). Adapun dari seluruh hutan mangrove yang saat ini masih ada, 39% diantaranya teridentifikasi dalam kondisi rusak.

Setelah meninjau potensi pasar perikanan Eropa beserta regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, maka perlu dirumuskan strategi-strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan terkait dengan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan ke Uni Eropa. Terdapat lima rumusan strategi yang disajikan melalui makalah ini, baik dari sisi strategi institusi keuangan publik, optimalisasi kelembagaan komunitas, serta pembiayaan alternatif, yang kiranya dapat dilakukan guna mencapai target peningkatan produksi dan ekspor tersebut.

Strategi pertama adalah terkait sinergitas otoritas perpajakan dan cukai dengan lembaga pembiayaan perikanan dan kelautan. Rumusan strategi pertama ini didasarkan pada registrasi kelembagaan perusahaan budidaya perikanan dan penangkapan yang masih sangat rendah. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP, BLU di bawah KKP) yang telah menerima mandat untuk menyalurkan permodalan dana bergulir yang cukup besar dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan tangkap dari sektor kelautan dan perikanan juga mengalami kendala terkait sangat rendahnya status legalitas para pengusaha di sektor ini. Berkaca pada program *tax amnesty* yang sudah dilaksanakan Pemerintah Indonesia, institusi perpajakan dan cukai dapat hadir dengan membantu para pengusaha di sektor kelautan dan perikanan untuk mendaftarkan usahanya, bukan dalam rangka penegakan hukum, namun lebih kepada sisi pelayanan. Bahkan, sangat perlu untuk menggaungkan lebih massif lagi berbagai fasilitas insentif dari pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan dari sisi perpajakan dan cukai yang mungkin selama ini belum diketahui para pelaku usaha, atau lebih jauh bahkan mungkin menakuti mereka karena banyaknya informasi tidak akurat. Perbaikan dari pendataan dari sisi perpajakan dan cukai terhadap para pelaku di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan gairah sektor sektor keuangan, dalam hal ini lembaga pembiayaan dan perbankan untuk secara serius menggarap sektor ini. Lebih jauh, beberapa perusahaan pembiayaan digital yang telah resmi

terdaftar (*financial technology - fintech*) juga secara perlahan akan masuk sektor ini. Sinergitas berbagai instansi ini, yang menaikkan angka kredit secara formal, juga diharapkan dapat mereduksi secara signifikan pembiayaan non-formal (*rentenir*) yang selama ini sangat merugikan para nelayan di lapangan. Terakhir, mengingat desa nelayan, khususnya di Indonesia bagian timur didominasi etnis tertentu yang beragama Islam, maka pendekatan syariah juga dapat diterapkan dari lembaga pembiayaan.

Strategi kedua yang dirumuskan adalah terkait perlunya fokus akselerasi revitalisasi dan pembangunan baru Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang terkoneksi dengan infrastruktur logistik yang lain seperti bandara, jalan tol, dan rel kereta api. Sinergitas banyak pihak sangat diperlukan untuk mengevaluasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) terkait konektivitas dari supply bahan baku dengan kecepatan pengiriman menuju konsumen. Sebagai contoh, penting untuk mempertimbangkan pelabuhan perikanan untuk bisa terkoneksi langsung dengan bandara dan jalan tol. Hal tersebut diperlukan mengingat untuk ikan jenis tertentu, misalnya tuna segar, sangat diperlukan kecepatan pengiriman yang hitungannya jam demi menjaga kualitas kesegaran ikan. Selain itu, bila kita mengadopsi guideline untuk *the transport trans-European (TEN-T) network*, maka salah satu karakteristik pelabuhan besar di Eropa adalah konektivitas dengan jaringan sungai besar yang juga bisa dilintasi oleh kapal-kapal besar. Oleh karenanya, di beberapa wilayah di tanah air yang memiliki sungai besar, potensi tersebut kiranya bisa dioptimalkan dalam mendukung pelabuhan perikanan serta pengembangan industri budidaya di sekitar aliran sungai-sungai besar. Contoh lain yang perlu dipikirkan adalah infrastruktur "rantai dingin", mengingat tempat-tempat penangkapan dan budidaya perikanan ada di daerah terpencil yang belum terjangkau listrik.

Strategi ketiga disampaikan dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan kapasitas daya tangkap nelayan Indonesia yang masih tradisional dan 99% dari mereka menggunakan kapal dengan ukuran <30 GT dengan *fishing gears* kurang efisien. Dari kajian SWOT, kami

menemukan bahwa berdasarkan data dari BPS saat ini terdapat 12.857 desa yang berada di tepian laut dan sebagian dari mereka berstatus sebagai desa nelayan. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang menggalakkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengakselerasi pertumbuhan perekonomian berbasis potensi lokal desa. Kami melihat bahwa dari sisi sumber daya manusia, para nelayan di tanah air memiliki kemampuan melaut yang sangat baik, terbukti meskipun hanya dengan perlengkapan tradisional mereka bisa menangkap ikan di perairan sesuai daya jelajah perahu mereka. Keunggulan sumber daya tersebut bila didukung dengan perahu yang besar serta peralatan tangkap yang baik maka akan menjadi kombinasi kapasitas yang potensinya tinggi. BUMDes dapat dioptimalkan sebagai perusahaan pemilik kapal diatas 30 GT sekaligus pengayom dari para nelayan yang menjadi binaan serta warga desa setempat. Sebagai institusi bisnis legal di bawah naungan instansi desa, BUMDes dapat jauh lebih mudah untuk mengakses permodalan dalam rangka pengadaan kapal besar, baik melalui perbankan, LPMUKP, maupun institusi keuangan lainnya, termasuk asuransi untuk mitigasi risiko. Dengan adanya pengadaan kapal bertonase besar di atas 30 GT oleh BUMDes di desa-desa pesisir, diharapkan kemampuan daya jelajah nelayan tanah air akan meningkat secara signifikan. Keberadaan BUMDes sebagai penanggung jawab nelayan akan juga membawa kesejahteraan secara kolektif dalam satu desa, sehingga peningkatan kesejahteraan nelayan akan jauh lebih merata dibandingkan bila pengadaan kapal tersebut bersumber dari modal perseorangan atau perusahaan privat.

Strategi keempat yang dirumuskan adalah terkait urgensi pengembangan budidaya ikan tuna. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memiliki peluang besar mengembangkan budidaya tuna sebagaimana yang sudah diupayakan akhir-akhir ini. *Tuna aquaculture* atau *fattening* telah serius dikembangkan di banyak negara dan produsen terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, Kroasia, dan Malta. Beberapa negara lainnya yang juga mengembangkan budidaya tuna antara lain Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, dan Turki. Angka produksi budidaya tuna mengalami peningkatan cukup signifikan dari hanya sekitar

Strategi keempat yang dirumuskan adalah terkait urgensi pengembangan budidaya ikan tuna. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memiliki peluang besar mengembangkan budidaya tuna sebagaimana yang sudah diupayakan akhir-akhir ini. *Tuna aquaculture* atau *fattening* telah serius dikembangkan di banyak negara dan produsen terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, Kroasia, dan Malta. Beberapa negara lainnya yang juga mengembangkan budidaya tuna antara lain Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, dan Turki. Angka produksi budidaya tuna mengalami peningkatan cukup signifikan dari hanya sekitar 421.000 ton di tahun 1998 hingga menjadi 7 juta ton di tahun 2017. Kondisi ini tentu harus disikapi serius oleh Indonesia sebagai penangkap tuna terbesar di dunia bila sewaktu-waktu, karena alasan keberlangsungan ekosistem, tuna hasil tangkap dari alam akan ditolak pasar. Oleh karenanya, pengembangan budidaya tuna harus menjadi strategi yang digarap bersama-sama, lintas institusi dan sektor, di Indonesia.

Strategi terakhir yang dirumuskan adalah upaya mereduksi emisi karbon serta memitigasi kerusakan lingkungan secara dini dengan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya *Green Climate Fund* (GCF). Rumusan strategi ini didasarkan pada landasan berfikir bahwa bila seluruh mitigasi kerusakan lingkungan hanya mengandalkan APBN, APBD, serta dana dari BUMN/D, maka tentu terdapat batasan ruang fiskal mengingat besarnya cakupan berbagai sektor yang harus diayomi oleh Pemerintah.

Mengingat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dan pesisir, merupakan negara yang terdampak langsung oleh perubahan iklim, maka banyak sekali program dan inisiatif yang dapat selaras dengan misi GCF. Lebih jauh, bila proyek yang dikerjakan digabungkan dengan proyek padat karya yang mengikutsertakan nelayan guna menyediakan mata pencaharian alternatif, khususnya ketika musim paceklik ikan dan cuaca buruk, maka kemungkinan persetujuan akan semakin lebih tinggi. Indonesia telah memiliki proyek yang sudah disetujui dengan pendanaan dari GCF antara lain untuk pemulihan hutan dan alih fungsi lahan. Oleh karenanya sangat perlu dirumuskan proyek yang terkait dengan pemulihan ekosistem laut, seperti penyelamatan terumbu karang serta kawasan mangrove yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perikanan dan kelautan dalam jangka panjang. GCF hanyalah salah satu contoh unit pembiayaan yang dapat diakses dalam rangka pendanaan upaya konservasi guna menjaga sustainabilitas lingkungan, termasuk untuk sektor perikanan dan kelautan. Sinergitas berbagai pihak untuk merumuskan proyek serta akuntabilitas dalam eksekusi pelaksanaan kegiatan, khususnya dari gangguan korupsi, sangat diperlukan. Hal tersebut tidak saja untuk pengaliran pembiayaan pembangunan, namun lebih jauh sebagai upaya konservasi alam untuk jangka panjang dengan tidak terlalu membebani ruang fiskal keuangan negara.

# Daftar Isi

<b>1</b>	<b>Ikhtisar Utama</b>	<b>24</b>	<b>Opportunity (Peluang Khusus untuk Pasar Eropa)</b>
<b>6</b>	<b>Daftar Isi</b>	<b>26</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
<b>7</b>	<b>Daftar Penjelasan Singkatan</b>	<b>29</b>	<b>Threat (Ancaman)</b>
<b>8</b>	<b>Pendahuluan</b>	<b>30</b>	<b>Kebijakan Indonesia Terkait Produksi Perikanan</b>
<b>10</b>	<b>Kebijakan Uni Eropa terkait Aquaculture and Fisheries</b>	<b>32</b>	<b>Kajian Strategi</b>
<b>10</b>	<b>The Common Fisheries Policies (CFP)</b>	<b>32</b>	<b>Strategi 1: Sinergitas Otoritas Perpajakan dan Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Perikanan dan Kelautan</b>
<b>12</b>	<b>European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)</b>	<b>33</b>	<b>Strategi 2: Sinergitas Pengembangan Kawasan terkait Pengembangan Industri Terpadu Perikanan dan Kelautan</b>
<b>12</b>	<b>The EU's fisheries control System</b>	<b>35</b>	<b>Strategi 3: Kapal Tangkap untuk BUMDes Sektor Kelautan</b>
<b>13</b>	<b>International Ocean Governance</b>	<b>35</b>	<b>Strategi 4: Pengembangan Budidaya Ikan Tuna</b>
<b>14</b>	<b>Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa-Indonesia</b>	<b>36</b>	<b>Strategi 5: Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Inisiatif Konservasi Sustainability Perikanan dan Kelautan</b>
<b>15</b>	<b>Permasalahan dan Potensi Pasar Perikanan Eropa</b>	<b>38</b>	<b>Penutup</b>
<b>19</b>	<b>Potensi serta Tantangan Perikanan dan Kelautan di Indonesia</b>	<b>39</b>	<b>Daftar Pustaka</b>
<b>19</b>	<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>41</b>	<b>Tentang Penulis</b>
<b>20</b>	<b>Opportunity (Peluang secara Umum)</b>		

## Daftar Penjelasan Singkatan

BPS	:	Badan Pusat Statistik
BUMDes	:	Badan Usaha Milik Desa
CEPA	:	<i>Comprehensive Economic Partnership Agreement</i>
CFP	:	<i>The Common Fisheries Policies</i>
EMFF	:	<i>European Maritime and Fisheries Fund</i>
EUMOFA	:	<i>European Union Market Observatory for Fisheries and Aquaculture</i>
FAO	:	<i>Food and Agriculture Organization of the United Nation</i>
GCF	:	<i>Green Climate Fund</i>
GT	:	Bahasa Inggris: <i>gross tonnage</i> , disingkat GT); Indonesia: tonase kotor
LIPI	:	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LPMUKP	:	Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
OECD	:	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
SWOT	:	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i>
TEN-T	:	<i>The Transport Trans-European Network</i>
UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNCLOS	:	<i>United Nations Convention on the Law of the Sea</i>
UNFCCC	:	<i>The United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
ZEE	:	Zona Ekonomi Eksklusif

## A

# Pendahuluan

Berdasarkan data dari *Food and Agriculture Organization of the United Nation* (FAO), produksi perikanan dunia pada tahun 2018 mencapai 179 juta ton pada tahun 2018. Dari jumlah tersebut, 156 juta ton dikonsumsi oleh manusia, dengan demikian didapatkan data bahwa konsumsi perkapita pertahun mencapai 20,5 Kg<sup>1</sup>. Masih berdasarkan data dari FAO, 46% produksi perikanan berasal dari budidaya perikanan. Adapun negara yang menjadi penghasil utama produk perikanan adalah China (35%). Di luar China, secara keseluruhan Asia menjadi penghasil utama perikanan (34%), benua Amerika (14%), Eropa (10%), Afrika (7%) dan Oceania (1%). Dari semua benua yang ada, hanya Eropa yang menunjukkan penurunan produksi perikanan<sup>2</sup>. Secara global, peningkatan konsumsi produk perikanan tiap tahunnya adalah sebesar 3,1%.

Indonesia adalah produsen perikanan tangkap nomor 2<sup>3</sup> di dunia setelah China (FAO, 2018)<sup>4</sup>. Hasil perikanan dan hasil industri perikanan Indonesia menyumbang 2,6% dari produk domestik bruto Indonesia<sup>5</sup>. Budidaya perikanan menyumbang hasil produksi sekitar dua pertiga produksi perikanan Indonesia. Volume hasil perikanan Indonesia dalam periode 2017 s.d. 2018 naik sebesar 4,45%. Sementara di saat yang sama, konsumsi ikan perkapita Indonesia naik menjadi 50,69 Kg/kapita. Adapun Indonesia, saat ini adalah produsen ikan tuna terbesar di dunia<sup>6</sup>. Indonesia juga memiliki potensi besar sebagai produsen udang dan lobster dunia. Indonesia menyumbang 7% produksi ikan tangkap di seluruh dunia<sup>7</sup>.

Ikan merupakan salah satu sumber protein utama yang cukup penting bagi masyarakat di Eropa. Saat ini, konsumsi ikan per kapita di Eropa sebesar 24.3 kg. Namun demikian, angka ini kurang merata, misalnya di Eropa tengah dan timur, konsumsi ikan perkapita hanya 6 kg, sekalipun tetap ada peningkatan konsumsi ikan perkapita, di samping peningkatan jumlah penduduk, terutama di Eropa barat dan utara. Adapun konsumsi ikan perkapita di Portugal mencapai 30 kg/kapita. Adapun permasalahan penurunan produksi perikanan di Eropa, terkait dengan kurang bisa bersaingnya harga produk dengan hasil produksi perikanan dan ikan tangkap dari Asia, sekalipun kualitas produknya sangat prima. Disamping itu, meskipun harga produk perikanan cukup tinggi di pasar setempat, industri perikanan di Eropa kurang memberikan *income* yang memadai bagi warga Eropa<sup>8</sup>.

Dari sisi jenis spesies konsumsi ikan, penduduk di Eropa menyantap cukup tinggi ikan Tuna yang sudah diproses dalam bentuk pengalengan (*canned*). Data dari EUMOFA<sup>9</sup>, pada tahun 2017 angka konsumsi ikan tuna per kapita di Eropa bahkan mencapai 3.07kg per capita per tahun. Angka ini bahkan lebih besar dari tiga jenis ikan lainnya yang diproduksi di Eropa, antara lain cod (2.31kg/kapita), salmon (2.24kg/kapita), dan alaska pollock (1.59kg/kapita). Untuk detail data konsumsi jenis ikan per kapita per tahun dapat dilihat pada halaman 43 dari makalah ini.

1 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>  
2 <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/>

3 <https://www.statista.com/statistics/240225/leading-fishing-nations-worldwide-2008/>

4 <http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf> halaman 9 appendix 1

5 <https://www.statista.com/statistics/1083946/indonesia-fisheries-contribution-to-gdp/#:~:text=In%202018%2C%20fisheries%20and%20the,largest%20fish%20producer%20after%20China.>

6 KKP – Republik Indonesia, 2019, "Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s/d Agustus 2019", Jakarta

7 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>

8 Varadi et al, 2000, "Aquaculture Development Trend in Europe", Fish Culture Research Institute, Szarvas

9 EUMOFA = European Union Market Observatory for Fisheries and Aquaculture products: [https://ec.europa.eu/fisheries/6-consumption\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/6-consumption_en)

**Per-capita consumption of fish and seafood per Member States**

(kg per capita in 2016 and % variation 2016/2015)



Untuk memenuhi kebutuhan ikan Eropa, Uni Eropa sendiri mengusahakan dengan berbagai usaha peningkatan produksi, namun dengan tetap memperhitungkan faktor keberlanjutan dan proteksi terhadap populasi ikan<sup>10</sup>. Hal ini sejalan dengan kebijakan dari FAO tahun 2015, dimana FAO menekankan pada pengimplementasian produksi perikanan berbasis *science*, manajemen budidaya perikanan yang baik, serta transparansi pemanfaatan dan perdagangan ikan secara internasional<sup>11</sup>. Uni Eropa berkomitmen untuk dapat mempertanggung jawabkan semua produk perikanan yang dikonsumsi di Eropa (baik hasil budidaya sendiri maupun impor) memenuhi syarat keberlanjutan dan tidak merusak alam<sup>12</sup>.

Menimbang hal-hal sebagaimana tersebut di atas, kajian ini berupaya untuk meninjau potensi pasar perikanan Eropa, beserta regulasi-regulasi yang harus dipenuhi, terkait dengan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan ke Uni Eropa. Selanjutnya akan disajikan analisa SWOT terkait kondisi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, khususnya terkait dengan peningkatan produksi dan daya saing ekspor. Pada bagian akhir, kajian ini akan mencoba menghadirkan beberapa rumusan strategi, baik dari sisi strategi institusi keuangan publik, optimalisasi kelembagaan komunitas, serta pembiayaan alternatif, yang kiranya dapat dilakukan guna mencapai target peningkatan produksi dan ekspor tersebut.

10 <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/>

11 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>

12 FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>



## Kebijakan Uni Eropa terkait *Aquaculture and Fisheries*

Laut, samudera dan pantai merupakan salah satu sumber daya alam Eropa. Berbagai bangsa di Eropa merupakan bangsa pelaut. Hingga saat ini, laut merupakan sumber penghidupan bagi jutaan rakyat Eropa, baik dari sektor perikanan, maupun pariwisata dan perdagangan. Industri perikanan Uni Eropa termasuk 4 besar dunia. Pentingnya laut dan pengelolaannya bagi Uni Eropa, misalnya tercermin dari pembicaraan mengenai hal ini dalam perundingan BREXIT. Manajemen perikanan merupakan salah satu poin penting yang mengalami kebuntuan dalam pembicaraan mengenai BREXIT. Dimana ketika tidak tercapai kesepakatan dengan Inggris, maka negara - negara Uni Eropa yang ada harus bersaing dan berbagi sumber daya alam yang masih tersisa (laut yang masih masuk wilayah Uni Eropa).

Dilandasi pertimbangan terbatasnya sumber daya alam kelautan ini, maka Uni Eropa memiliki berbagai kebijakan untuk mengatur laut dan memastikan agar industri perikanan tidak mengancam kelestarian lingkungan. Adapun kebijakan Uni Eropa mengenai perikanan, diantaranya:

### ***The Common Fisheries Policies (CFP)***

CFP pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an, dan sejak itu kebijakannya terus mengalami pembaharuan. Adapun kebijakan terakhir dari CFP berlaku dari 1 Januari 1974. Tujuan utama dari CFP adalah memastikan kegiatan perikanan di Eropa "*sustainable*", baik terkait aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. CFP tidak hanya memastikan masyarakat Eropa mengkonsumsi produk perikanan yang sehat, namun juga memperhatikan komunitas yang terkait dengan industri dan budidaya perikanan untuk hidup sejahtera.

Terkait dengan isu lingkungan, CFP menetapkan bahwa setidaknya pada tahun 2015–2020 didapatkan kesepakatan mengenai volume penangkapan ikan yang berkelanjutan yang dapat memastikan kelestarian dari stok ikan di perairan Eropa. CFP mengatur ikan-ikan apa saja yang boleh ditangkap oleh armada nelayan, serta bagaimana prosedur yang harus dilakukan bilamana menangkap ikan yang tidak memenuhi syarat untuk ditangkap (ikan langka, ikan yang ukurannya terlalu kecil, dll).

Untuk mencapai tujuannya, CFP memiliki beberapa kebijakan utama, yaitu :

#### **1. Manajemen Perikanan**

Kebijakan untuk manajemen perikanan dititikberatkan pada upaya untuk menjaga agar ikan di perairan Eropa dapat bereproduksi dan tidak habis karena dieksploitasi. Untuk itu ditentukan quota dan ukuran ikan yang boleh ditangkap, di samping peraturan – peraturan yang mengatur di perairan mana saja nelayan Eropa diizinkan menangkap ikan. Quota ini juga memastikan agar nelayan membagi dengan adil komoditas ikan yang ada. Quota ini ditetapkan setiap tahun untuk menentukan ikan apa saja yang boleh ditangkap tahun selanjutnya dan di perairan mana saja.<sup>13 14 15</sup>

Penetapan kuota didasarkan pada kajian ilmiah yang dilakukan oleh negara-negara anggota EU. CFP juga memberikan kesempatan pada masing-masing negara untuk mengatur perairan dan industri perikanan sendiri. CFP menjadi jembatan antara pihak Uni Eropa dengan institusi dari masing - masing negara anggota terkait industri perikanan.

13 EU, 2019, "EU fisheries in the North East Atlantic, North Sea and Baltic Sea In line with maximum sustainable yield (MSY)

14 EU, 2019, "Fishing Areas in the EU"

15 EU, 2019, "Fishing Areas in the Baltic Sea"

## 2. Kebijakan internasional

Sekitar 20% dari armada kapal ikan Uni Eropa menangkap ikan di luar perairan Uni Eropa, dimana 9,3% menangkap ikan di perairan ZEE negara di luar Uni Eropa yang memiliki perjanjian khusus dengan Uni Eropa, serta 2,2% lainnya di perairan ZEE negara lainnya.<sup>16</sup>

Mengingat hasil perikanan di dalam Uni Eropa tidak dapat memenuhi kebutuhan di dalam Uni Eropa, maka Uni Eropa membuka pintu impor dari negara – negara lain, yang mana produk dari negara lain ini bisa tidak terkena pajak, bilamana negara tersebut memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, maupun mendapatkan tarif pajak rendah (4% atau 6%), tergantung dari perjanjian dengan negara terkait.<sup>17</sup>

Terkait dengan kebijakan internasional ini, untuk saat ini dengan adanya pembicaraan mengenai BREXIT, Uni Eropa menghadapi tantangan yang cukup besar. Angka 20% armada kapal yang menangkap ikan di luar perairan Uni Eropa, terancam bertambah, atau bahkan tidak mendapat akses lagi untuk menangkap ikan di perairan Inggris. Adapun negara - negara yang terdampak langsung komunitas nelayannya, diantaranya Perancis, Belanda dan Belgia yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan Inggris. Sebagian nelayan dari Belgia misalnya, berpegang pada hak menangkap ikan di wilayah Inggris yang diberikan berabad-abad yang lampau. Dengan adanya BREXIT ini, hak tersebut terancam tidak berlaku lagi. Uni Eropa harus bernegosiasi mengenai masalah ini dengan pemerintah Inggris.

## 3. Kebijakan perdagangan

Terkait perdagangan, Uni Eropa mensyaratkan bahwa setiap produk perikanan yang masuk ke wilayahnya harus transparan mengenai asalnya, maupun kewajiban untuk menjaga kelestarian lingkungan bagi produsennya. Hal ini termasuk produk perikanan yang berasal dari negara di luar

Uni Eropa. Konsumen di dalam Uni Eropa berhak mendapatkan informasi mengenai produk yang mereka konsumsi.<sup>18</sup>

Adapun informasi yang harus disediakan bagi konsumen adalah sebagai berikut: nama komersial dan nama ilmiah produk, asal usul produk (ikan tangkapan atau ikan budidaya), area produksi/tangkapan beserta metode dan alat yang digunakan untuk menangkap ikan, serta tanggal kadaluarsa produk. Produk juga boleh dilengkapi dengan data–data seperti tanggal penangkapan, teknik produksi, informasi terkait lingkungan, ekonomi dan sosial, serta kandungan gizi.<sup>19</sup>

Uni Eropa juga sedang membahas penerbitan sertifikat “*eco-label*” untuk produk–produk perikanan yang akan dipasarkan di wilayahnya. *Eco-label* merupakan sistem pelabelan pada produk makanan untuk memastikan produk tersebut dari bahan mentah, proses pengolahan, distribusi hingga ke tangan konsumen, tidak merusak lingkungan. Pelabelan ini akan mempertemukan harapan akan lingkungan yang sustainable dari konsumen, dengan inovasi dari produsen makanan, serta dengan peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang memastikan produksi makanan yang berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan.<sup>20</sup>

Penelitian dari EUMOFA menunjukkan bahwa di seluruh wilayah Eropa, konsumen sangat menghargai informasi mengenai produk yang mereka konsumsi. Informasi tersebut bisa didapatkan dari internet, televisi, media massa maupun informasi dari nelayan dan pedagang ikan. Adapun informasi–informasi yang dianggap sangat penting oleh konsumen ikan di Eropa adalah sebagai berikut : tanggal kadaluarsa, nama spesifik ikan, serta apakah produk ini sebelumnya merupakan produk “*frozen*”. Data–data ini sangat penting bagi konsumen dari wilayah Eropa selatan.<sup>21</sup>

16 <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international>

17 COUNCIL REGULATION (EU) 2018/1977, 2018, “opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019–2020”, ST/14460/2018/INIT

18 Commission Staff , 2013, “Guidance document on the implementation of Chapter II “Professional Organisations” of Regulation (EU) No 1379/2013 establishing a common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, Brussels

19 <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information>

20 Prieto-Sandoval, et all , 2016., “ECO-labels as a multidimensional research topic: Trends and opportunities”. Journal of Cleaner Production. 135: 806–818. doi:10.1016/j.jclepro.2016.06.167

21 EUMOFA, 2017, “FinalReport:EUConsumerHabitsRegarding FisheriesandAquacultureProduct”, ISBN:978-92-79-69463-9 DOI:10.2771/758623

Masih dari penelitian EUMOFA, didapatkan data bahwa informasi yang juga dianggap penting ialah informasi mengenai tanggal penangkapan, disamping informasi mengenai isu lingkungan, apakah produk perikanan tersebut sustainable. Untuk isu lingkungan, uniknya hanya dipandang

penting di wilayah Eropa utara, di kalangan orang – orang berpendidikan tinggi serta di kalangan generasi muda. Sedangkan informasi mengenai pelabuhan asal, asal kapal, informasi etika dan sosial komunitas nelayan dipandang kurang penting.<sup>22</sup>

## European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)

Terdapat perbedaan kondisi dan situasi dalam industri perikanan dari negara yang satu dengan negara yang lain dalam Uni Eropa. Untuk itu dibutuhkan program-program dari Uni Eropa sendiri guna mendorong kesamaan standar dalam kegiatan perikanan di seluruh wilayah Uni Eropa. EMFF mengatur mengenai pendanaan bagi program-program perikanan di dalam Uni Eropa, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Membantu nelayan Eropa dalam transisi dari kegiatan perikanan tradisional menuju ke kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan ramah terhadap alam lingkungan.
2. Mendukung dan mendorong komunitas masyarakat pantai untuk diversifikasi kegiatan ekonomi.
3. Mendanai proyek-proyek yang menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah pantai Eropa.
4. Mendukung kegiatan budidaya perikanan yang berkelanjutan di wilayah Uni Eropa
5. Membuat program bagi nelayan untuk mendapatkan akses mudah dalam hal permodalan untuk kegiatan perikanan yang dilakukan. Sistem pendanaan ini dikombinasikan dengan pendanaan masing-masing negara anggota.

## The EU's fisheries control system

Sistem kontrol perikanan di Uni Eropa akan digunakan untuk:<sup>23</sup>

1. Mengawasi jumlah ikan yang ditangkap serta memerangi illegal fishing.
2. Mengumpulkan data perikanan guna mengelola kesempatan penangkapan ikan
3. Memastikan kebijakan dan ketentuan dalam kegiatan industri perikanan yang telah ditetapkan dipatuhi oleh negara-negara anggota, serta menjadi jembatan antara negara anggota dengan Uni Eropa.
4. Memungkinkan kegiatan penelusuran dan pengecekan atas produk perikanan dari saat penangkapan hingga sampai ke tangan konsumen. Dari pelabuhan dimana kapal ikan merapat, transportasi produk perikanan, proses pengolahan di pabrik, juga di pasar, dimana produk perikanan dijual.

Masalah yang sering timbul ialah masalah kuota perikanan yang ditetapkan atas negara anggota. Sistem kontrol ini akan memastikan semua kapal ikan berada di dalam pengawasan serta memiliki lisensi untuk melaut, termasuk kapal-kapal kecil dibawah 12 meter. Adapun pelanggaran terhadap peraturan yang ditetapkan Uni Eropa dapat berakibat pada pembatalan lisensi melaut pada jangka waktu tertentu.

Uni Eropa juga hanya menerima produk perikanan (termasuk dari negara di luar Uni Eropa) yang masuk kategori legal. Adapun untuk mendapatkan predikat legal, maka penangkapan dan budidaya perikanan haruslah memperhatikan antara lain cadangan stok ikan, tidak menghancurkan habitat ikan di alam, tidak terlibat kompetisi yang tidak adil, serta tidak menghancurkan kehidupan komunitas nelayan, khususnya di negara-negara berkembang<sup>24</sup>. Uni Eropa juga tidak akan mentoleransi kapal-kapal Uni Eropa yang mencuri ikan di wilayah lain di dunia.

22 EUMOFA, 2017, "Final Report: EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623

23 <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/>

24 [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal\\_fishing\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en)

## **International Ocean Governance**

Seperti disebutkan di atas, 20% kapal–kapal ikan Eropa mencari ikan di luar wilayah Uni Eropa. Untuk itu terdapat berbagai perjanjian kerja sama dengan negara di luar Uni Eropa mengenai hal ini. Perjanjian–perjanjian tersebut diantaranya :

### **1. Perjanjian bilateral**

Secara umum dalam perjanjian ini negara–negara tertentu mengizinkan kapal–kapal dari negara–negara Uni Eropa untuk mencari ikan di perairan ZEE mereka. Adapun sebagai imbalannya, Uni Eropa memberikan akses bagi kapal–kapal dari negara tersebut ke ZEE Uni Eropa. Uni Eropa juga mensupport program–program perikanan berkelanjutan dari negara–negara tersebut secara finansial. Adapun negara–negara yang diikat perjanjian semacam ini kebanyakan adalah negara–negara di Afrika barat. Perjanjian dengan negara–negara Afrika barat, pada umumnya terkait dengan penangkapan ikan tuna, sekalipun perjanjian dengan beberapa negara juga mencakup penangkapan ikan selain Tuna.

Uni Eropa juga memiliki perjanjian bilateral dengan negara–negara Atlantik utara, misalnya: Norwegia, Kepulauan Faroe dan Islandia. Namun, perjanjian ini lebih terkait dengan perjanjian untuk berbagi hasil perikanan di perairan negara terkait.

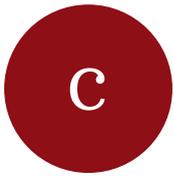
### **2. Perjanjian Multilateral**

Perjanjian multilateral yang dilakukan oleh Uni Eropa terkait dengan badan–badan dunia seperti: *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan *Agreement on compliance with conservation and management measures*, serta *Code of Conduct for Responsible Fisheries* dari FAO. Adapun poin utama dari konvensi ini ialah untuk mempromosikan sustainable fishing, yang mana melarang praktik – praktik eksploitasi hasil laut yang merusak alam.

### **3. Regional**

Perjanjian regional merupakan perjanjian antara Uni Eropa dengan badan–badan pengelola perairan dari wilayah lain di dunia, misalnya di wilayah Atlantik, Samudera Hindia, Mediterania, dan regional lainnya. Adapun terkait jumlahnya, terdapat 6 perjanjian terkait tuna dan 11 perjanjian terkait hasil perikanan non tuna.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa berperan aktif dan sangat mementingkan kegiatan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Tidak hanya di wilayahnya sendiri, namun Uni Eropa juga mensyaratkan bahwa produk perikanan yang masuk ke wilayahnya, selain memiliki kualitas yang tinggi, juga harus memenuhi persyaratan–persyaratan tersebut di atas. Namun demikian Uni Eropa juga bekerja sama dengan negara–negara lain, khususnya di sekitarnya untuk mendapatkan hak penangkapan ikan di wilayah di luar Uni Eropa tersebut.



## Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Uni Eropa-Indonesia

**P**roduk perikanan mentah dari negara di luar Uni Eropa dapat diterima sebagai barang impor di Uni Eropa tanpa pajak, bilamana terdapat perjanjian perdagangan bebas antara negara tersebut dengan Uni Eropa. Untuk itu perlu ditinjau progress dari perundingan terkait *comprehensive economic partnership agreement* (CEPA) atau perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Uni Eropa (UE) dan Indonesia.

Hingga saat ini, telah dilakukan perundingan tahap ke-10 antara Indonesia dan Uni Eropa, di mana bidang maritim, perikanan dan budidaya perikanan termasuk di dalamnya. Namun demikian, luasnya cakupan perjanjian ini menjadi permasalahan tersendiri. Uni Eropa dan Indonesia memiliki cara pandang yang berbeda dalam banyak hal. Selain hambatan karena perjanjian nantinya harus disahkan oleh parlemen. Hambatan yang lain di luar masalah ekonomi ialah upaya Uni Eropa untuk menyebarkan nilai-nilainya seperti perlindungan warga sipil, hak asasi manusia dan masalah sosial melalui perjanjian perdagangan<sup>25</sup>. Indonesia belum pernah memberikan komitmen yang kuat mengenai hal-hal tersebut, disamping masalah transparansi dan komitmen terhadap perlindungan alam.

Persyaratan dari Uni Eropa sangat jelas, “*We call on the EU and Indonesia to use the CEPA negotiations to design an investment chapter that prioritises equitable and sustainable development, the preconditions for which include a healthy environment, a climate-friendly economy, security of livelihoods and decent work for all. The CEPA must be conditional on the ratification and implementation of basic human rights law, as well as climate and environmental agreements. To safeguard these preconditions, the framework for foreign investments requires binding and enforceable investor obligations in the area of human rights, climate change and environmental due diligence, and requirements to promote local employment.*”<sup>26</sup> Hal ini tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh Indonesia yang harus melindungi kepentingan nasionalnya.

Di sisi lain, perjanjian ini dipandang akan lebih meningkatkan impor Indonesia daripada ekspor Indonesia terhadap Uni Eropa. Disamping juga permasalahan terkait ekspor barang mentah pertambangan yang diinginkan oleh Uni Eropa, namun ditentang oleh Indonesia yang ingin meningkatkan industri dalam negeri. Contoh yang lain mengenai isu lingkungan adalah mengenai sawit. Dalam perundingan perjanjian ini, Indonesia berharap untuk bisa mendapatkan hak, seperti yang didapatkan Vietnam dari perjanjian serupa dari Uni Eropa.

25 Horn, et al, 2009. “Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements,” CEPR Discussion Papers 7317, C.E.P.R. Discussion Papers

26 Knottnerus, R, et al, 2018, “The EU – Indonesia CEPA negotiations Responding to calls for an investment policy reset: are the EU and Indonesia on the same page?,” Published by SOMO, TNI, IGJ



## Permasalahan dan Potensi Pasar Perikanan Eropa

Peningkatan konsumsi ikan bagi masyarakat Eropa, turut dipengaruhi kampanye untuk mengurangi konsumsi daging merah. Baik dengan alasan kesehatan, maupun efek bagi lingkungan. Akhir-akhir ini kampanye untuk mengurangi konsumsi daging sapi digelar di berbagai tempat di Eropa. Dengan menurunnya produksi perikanan Eropa, maka fenomena ini merupakan peluang bagi Indonesia.

Kita perlu mengenali potensi pasar perikanan Eropa. Untuk negara-negara Eropa timur, konsumsi dapat dikatakan relatif rendah dibandingkan region lain di Eropa, di wilayah ini, pasar ikan sangat tergantung pada suplai lokal dan harga ikan. Namun demikian, suplai ikan dari bagian lain Eropa turut menurunkan harga produk perikanan menjadi lebih terjangkau. Karakter yang hampir sama juga ditemukan di kawasan Eropa Tengah<sup>27</sup>.

Adapun untuk negara-negara Eropa Barat, konsumsi ikan relatif tinggi ditunjang oleh tradisi kuliner dari masa lalu serta ketersediaan ikan segar yang cukup mudah didapatkan. Selain itu gaya hidup baru terutama bagi generasi muda, yang mana terkait dengan kesadaran kesehatan dan trend gaya hidup, seperti kebiasaan makan sushi turut meningkatkan tren konsumsi ikan di wilayah ini. Namun demikian, akhir-akhir ini masyarakat lebih banyak membeli produk perikanan di supermarket dibandingkan pasar ikan.<sup>28</sup>

Untuk negara-negara Eropa utara, konsumsi ikan sangat bergantung pada impor. Dibandingkan dengan rata-rata wilayah lain di Eropa, kawasan ini relatif rendah angka konsumsi produk perikanan. Warga di kawasan ini mengang-

gap produk-produk perikanan adalah barang yang cukup mahal, di samping mereka mulai menyadari pentingnya aspek keberlanjutan dalam produksi makanan. Sedangkan kawasan Eropa selatan sangat bervariasi, dari Portugal yang jauh di atas rata-rata Eropa dalam mengkonsumsi ikan, hingga Kroasia yang dapat dikatakan cukup rendah apabila dibandingkan rata-rata perkapita Eropa.<sup>29</sup>

Untuk produk perikanan Eropa, didominasi oleh kelompok ikan Salmon (Laut Utara dan Samudera Atlantik/Norwegia), ikan-ikan laut dalam, kepiting, kerang dan tiram (Laut Mediterania).<sup>30</sup>

Tantangan bagi pengembangan budidaya perikanan di Eropa antara lain meliputi:<sup>31</sup>

- Untuk budidaya kerang (*mussels*) permasalahan yang timbul adalah polusi yang mengganggu keanekaragaman hayati wilayah pantai di Eropa. Disamping itu, secara umum, budidaya perikanan Eropa harus bersaing juga dengan aktivitas wisata di pantai-pantai yang menjadi andalan devisa negara setempat;
- Masalah kualitas air laut;
- Alokasi air untuk budidaya perikanan darat (terutama di wilayah Eropa tengah dan timur), dimana air tawar juga diperlukan untuk konsumsi manusia;<sup>32</sup>
- 60% sungai, danau, rawa-rawa di Eropa tidak sehat untuk perikanan air tawar, setelah berabad-abad dieksploitasi untuk kehidupan manusia, misal untuk irigasi, jalur transportasi, maupun tempat pembuangan limbah.<sup>33</sup>

27 UMOFA, 2017, "Final Report : EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623

28 EUMOFA, 2017, "Final Report : EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623

29 EUMOFA, 2017, "Final Report : EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623

30 Varadi et al, 2000, "Aquaculture Development Trend in Europe", Fish Culture Research Institute, Szarvas

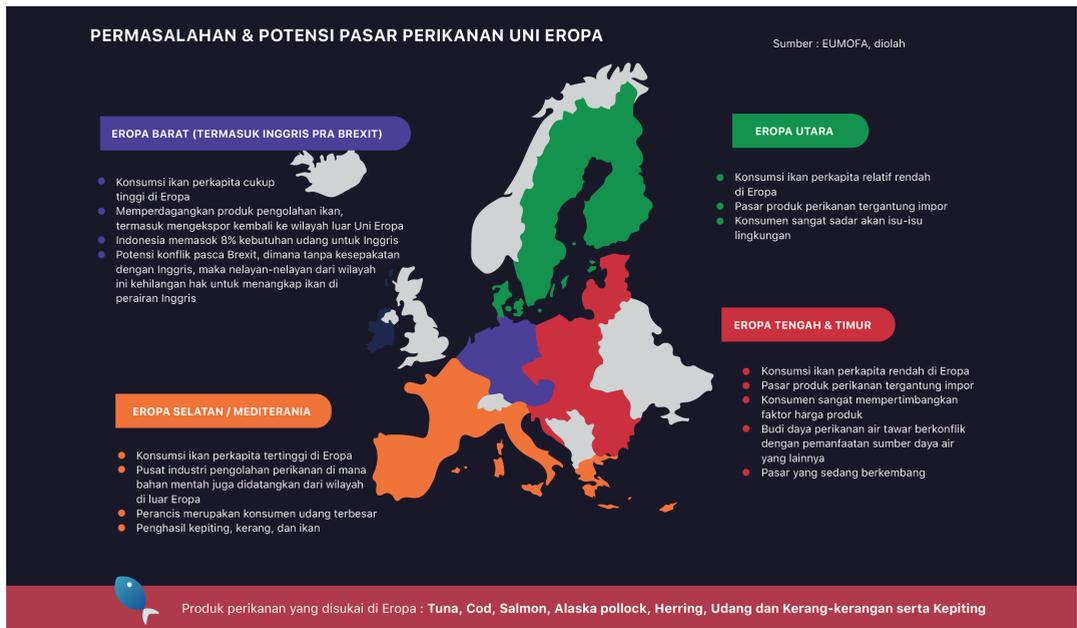
31 Varadi et al, 2000, "Aquaculture Development Trend in Europe", Fish Culture Research Institute, Szarvas

32 Aps, R, et al, 2004, "Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability", IUCN, Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Warsaw

33 [https://www.wwf.eu/what\\_we\\_do/water/?uNewsID=364693](https://www.wwf.eu/what_we_do/water/?uNewsID=364693)

Uni Eropa juga menghadapi tantangan dari kebijakannya sendiri, mengingat kebijakan Uni Eropa yang mengedepankan keberlanjutan justru mengancam kehidupan dari komunitas nelayan. Dalam hal ini nelayan sangat dibatasi hasil tangkapannya. Pembatasan yang ada menyebabkan negara-negara penghasil produk perikanan untuk berada di luar Uni Eropa, misalnya Norwegia. Adapun kebijakan pembatasan ini juga belum terbukti membantu melestarikan stok ikan di

wilayahnya.<sup>34</sup> Dapat dikatakan bahwa kebijakan Uni Eropa lebih menitikberatkan aspek lingkungan dibandingkan aspek ekonomi dan sosialnya. Kondisi ini menjadi semakin pelik dengan adanya BREXIT, dimana area perairan Uni Eropa menjadi berkurang ketika Inggris keluar dari Uni Eropa. Uni Eropa harus memperjuangkan kepentingan nelayan - nelayannya dalam perundingan dengan Inggris.



Hingga saat ini, Indonesia masih belum masuk 5 besar negara pengekspor ikan untuk memenuhi pasar Eropa. Salah satu kendala dari pengembangan potensi ekspor hasil perikanan ke Uni Eropa saat ini adalah belum sepakatnya Indonesia dengan Uni Eropa untuk perjanjian perdagangan bebasnya. Hal tersebut menyebabkan produk Indonesia harus menanggung besarnya bea masuk. Di samping itu, untuk dapat menembus pasar Uni Eropa, kita harus memahami target pasar di Uni Eropa sendiri, serta tidak boleh melihat Uni Eropa sebagai single market. Tiap region dan negara memiliki karakteristik dan *demand* tersendiri. Namun secara umum, gambaran pasar di Eropa adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- Negara-negara di wilayah mediterania adalah konsumen ikan terbesar di Eropa. Adapun produk-produk yang mereka sukai diantaranya: Tuna (biasanya produk kalengan), cod, salmon, alaska pollock, herring, udang (*crustacea*), serta kerang – kerangan.
- Negara-negara di wilayah mediterania selain menjadi konsumen terbesar produk-produk perikanan, juga merupakan negara-negara dengan industri pengolahan hasil perikanan terbanyak. Negara – negara ini mengimpor hasil-hasil laut mentah dari negara berkembang, untuk kemudian diolah dan dipasarkan di Eropa.

34 Black, Richard , 2010. "Profound' decline in fish stocks shown in British records". BBC News. Retrieved 5 May 2010.

35 Eirikur, B, 2017, "Iceland: Ever-Lasting Independence Struggle". Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Politics. Palgrave Macmillan UK. pp. 93–124

- Imbas dari pandemi covid 19, permintaan akan ikan segar sedikit menurun, digantikan oleh permintaan akan ikan yang sudah diproses maupun produk *frozen* (beku). Hal ini terkait juga dengan kondisi dimana banyak negara Eropa menerapkan kebijakan *lockdown*, sehingga masyarakat menimbun makanan kalengan dan makanan beku.<sup>36</sup> Kebijakan *lockdown* ini juga berimbas pada nyaris tidak adanya permintaan produk perikanan dari industri hotel, restoran, dan cafe. Selama ini kebijakan *lockdown* di Eropa sangat memukul usaha hotel, restoran, dan cafe. Mereka selalu diperintahkan untuk menutup usahanya selama *lockdown*. Selain itu, Pandemi ini pertama kali muncul di China, yang segera menerapkan kebijakan *lockdown*. *Lockdown* di China menyebabkan pasokan hasil perikanan ke Eropa terganggu.<sup>37</sup>
- Perancis merupakan pasar terbesar untuk udang organik. Untuk pasar udang di Uni Eropa, semuanya didatangkan dari negara lain (*tropical shrimps*, species *penaeus*) dalam kondisi mentah atau dibekukan, untuk kemudian dimasak di negara pengonsumsi, sebelum dijual di pasar. Untuk pasar Perancis saja, udang masak mencapai hingga 70 ribu ton per tahun.<sup>38</sup>
- Adapun pasar udang mentah atau beku untuk Eropa secara keseluruhan ialah 258.000 ton pada tahun 2015. Dari angka ini, Indonesia hanya memasok pasar udang di United Kingdom (8%).<sup>39</sup> Dengan demikian, situasi BREXIT perlu juga menjadi perhatian, mengingat United Kingdom tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa.
- Untuk Eropa barat, pasar terbesar ialah Belanda, Belgia, Jerman dan Inggris (sebelum Brexit). Namun demikian, Belanda, Belgia

dan Jerman mengimpor produk perikanan bukan hanya untuk konsumsi penduduknya. Negara-negara ini mengimpor fillet ikan, crustacea, dan ikan-ikan kalengan (tuna). Untuk udang, negara – negara ini menerima udang mentah atau beku dan kemudian diolah/dimasak untuk selanjutnya dipasarkan kembali ke negara-negara Eropa lainnya, atau bahkan ke negara - negara di luar Uni Eropa.<sup>40</sup>

- Pasar Eropa Tengah dan timur menyerupai pasar Eropa barat laut, namun dengan volume yang lebih kecil, dan saat ini merupakan pasar yang terus berkembang.

Berdasarkan pemetaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang berpotensi dipasarkan di Eropa adalah crustacean, ikan yang diawetkan, kerang-kerangan, dan fillet ikan. Lebih spesifik lagi, produk udang, tuna, cumi-cumi, dan fillet ikan. Adapun karakter untuk masing masing negara mengenai konsumsi hasil perikanan sangat bergantung pada situasi masing-masing negara, tradisi kuliner dari masing-masing negara, serta kompetisi harga.<sup>41</sup> Untuk tradisi kuliner dan kondisi geografis negara turut mempengaruhi pilihan konsumen terhadap ikan, apakah ikan air laut maupun ikan air tawar.<sup>42</sup> Harga merupakan faktor dominan bagi konsumen (khususnya di Eropa Tengah dan Timur) selain penampilan produk.<sup>43</sup>

Terkait dengan regulasi dan persepsi masyarakat, perlu diperhatikan meningkatnya kesadaran akan isu lingkungan dan hak asasi manusia/komunitas. Sebagai contoh, isu mengenai budidaya udang di negara-negara berkembang selalu dikaitkan dengan isu lingkungan, serta eksploitasi sumber daya manusia.<sup>44</sup>

36 Booker, C , 2007 "Fishing quotas are an ecological catastrophe". The Daily Telegraph. London.

37 <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand#:~:text=With%20the%20increasing%20demand%20for,2017%2C%20reported%20at%20%243.1%20billion>

38 <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand#:~:text=With%20the%20increasing%20demand%20for,2017%2C%20reported%20at%20%243.1%20billion>.

39 AIPCE, 2020, "Initial Impact Assessment of COVID-19 on the Fish Processing and Trade Sector" Brussels

40 EUMOFA, 2017, "Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain", Brussels

41 EUMOFA, 2017, "Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain", Brussels

42 EUMOFA, 2017, "Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain", Brussels

43 EUMOFA, 2017, "Final Report : EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623

44 Vella, K, 2016, "Fishery and Aquaculture Products, an Overview of EU Consumer Habits, Brussels

## BREXIT

Seperti telah disebutkan di atas, Brexit bagi Uni Eropa dan Inggris memberikan tantangan baru. Masalah pada sektor perikanan hanyalah sebagian kecil dari tantangan pasca Brexit, termasuk aneka kesepakatan lainnya yang masih harus dirundingkan antara kedua belah pihak. Namun demikian, isu perikanan ini oleh banyak pihak dikatakan sebagai topik yang cukup mengganggu karena adanya saling ketergantungan antara Eropa daratan dengan Inggris. Selain itu, di saat yang sama isu ini juga terkait dengan persepsi “kedaulatan di lautan”, setidaknya bagi para pendukung Brexit di Inggris. Kesulitan bagi kedua belah pihak untuk mencapai kata sepakat terkait isu ini menjadikan perundingan terlambat selama hampir empat tahun sejak 2016 hingga menjelang Natal 2020.

Ketika Inggris masih menjadi bagian Uni Eropa, maka Inggris harus mematuhi kebijakan dari CFP. Sebagai negara kepulauan, yang memiliki perairan yang relatif “kaya ikan”, Inggris harus berbagi ikannya dengan negara-negara Uni Eropa lainnya yang memiliki perbatasan laut dengan Inggris. Namun pada saat yang sama, nelayan Inggris harus dibatasi kuota CFP untuk penangkapan ikan di wilayahnya sendiri. Tentu saja hal ini menimbulkan ketidakpuasan. Dengan adanya kesepakatan tanggal 24 Desember, maka disepakati kalau masa transisi menjadi 5,5 tahun. Dengan penurunan akses ke perairan Inggris sebesar 25% dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Wageningen University mengestimasi bahwa BREXIT, termasuk kesepakatan perdagangan antara UK dan Uni Eropa, tidak akan terlalu berpengaruh pada produksi ikan secara global (Bartelings & Kristkova, 2018). Namun demikian, dalam skala regional, beberapa negara yang berbatasan langsung dengan perairan UK, seperti Belanda, Belgia, Perancis, Spanyol, dan beberapa negara lainnya akan terdampak langsung, khususnya terkait akses dan rantai produksi ikan yang terkait perairan Inggris. Dampak langsung tersebut berupa penurunan antara -1% s.d. -6%. Jenis spesies ikan yang terdampak langsung juga sangat kecil, yakni hanya jenis pelagic, seperti herrings dan beberapa jenis tuna. Penurunan

produksi yang terbatas ini, termasuk bila terdapat pembatasan tertentu, maka akan berdampak pula pada kenaikan harga di pasar Uni Eropa, karena adanya perubahan rantai penawaran, peningkatan biaya produksi sebesar 45%, sehingga diperkirakan turut sedikit menurunkan tingkat konsumsi. Adapun Inggris akan mengalami kondisi yang sedikit menguntungkan akibat adanya penurunan harga ikan dikarenakan surplus produksi dan hasil tangkap ikan. Untuk merespon potensi adanya kenaikan jumlah ikan tangkap di Inggris tersebut, Perdana Menteri Inggris berencana memberikan stimulus bagi industri pengolahan hasil perikanan di negaranya.

Brexit serta kesepakatan perjanjian yang baru akan membuat Inggris untuk tidak perlu lagi mengikuti aturan kuota dari CFP yang berlaku di Eropa. Perjanjian yang baru juga memungkinkan Inggris untuk memiliki kendali penuh dalam mengelola sumber daya perikananannya. Namun demikian, Inggris tetap sepakat untuk berkoordinasi dengan Uni Eropa dalam masa peralihan 5,5 tahun mendatang<sup>1</sup>. Adapun koordinasinya terkait kegiatan pengelolaan dan memastikan aspek keberlanjutan dalam hal stok ikan di perairan antara Inggris dan Uni Eropa.

Hingga tulisan ini dibuat pada tanggal 25 Desember 2020, kesepakatan yang terjadi baru pada tingkat Perdana Menteri Inggris dengan Presiden Uni Eropa<sup>2</sup>. Kesepakatan tingkat ini masih memerlukan beberapa tahapan pembahasan lanjutan di kedua belah pihak, antara lain di tataran parlemen masing-masing, sehingga masih dapat terus bergerak dan dimungkinkan adanya perubahan disertai beberapa penyesuaian. Hal tersebut sangat dimungkinkan, terlebih mengingat adanya ketidakpuasan dari komunitas nelayan di beberapa negara yang terdampak langsung.

Mengingat kepekatkan BREXIT, khususnya terkait perikanan, diestimasi tidak akan terlalu mempengaruhi produksi ikan global, maka dampak tersebut tentunya tidak akan banyak berpengaruh pada rantai produksi kelautan dan perikanan di Indonesia. Namun demikian, pergerakan dan perubahan pasar perikanan di Eropa, termasuk pasca Brexit, harus selalu dilihat sebagai peluang dan dioptimalkan kesempatannya oleh para pelaku industri sektor ini di tanah air.

45 EU-UK Trade and Cooperation Agreement, [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_20\\_2531](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531)

46 [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP\\_20\\_2531](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2531)



# Potensi serta Tantangan Perikanan dan Kelautan di Indonesia

Untuk menggali potensi serta tantangan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia, khususnya dalam rangka merespon potensi pasar produk perikanan di Eropa, kami akan melakukan analisa SWOT yang disajikan pada tabel di bawah ini. Adapun penjelasan dari masing-masing bagian dapat dilihat pada bagian uraian setelah tabel SWOT.

## Analisa SWOT untuk Potensi Perikanan Indonesia dalam Merespon Pasar Eropa

### Strengths

- Geografis Indonesia sebagai negara maritim yang sangat mendukung untuk produksi sektor perikanan dan kelautan
- Potensi lahan budidaya yang sangat luas disertai iklim tropis
- Banyaknya penduduk Indonesia, baik sebagai produsen maupun konsumen produk perikanan dan kelautan

### Opportunities

- Banyaknya potensi perikanan dan kelautan yang masih belum diproduksi
- Banyaknya pasar yang masih belum terpenuhi dan proyeksi kenaikan permintaan pasar

### Weaknesses

- Dominasi tinggi dari nelayan tradisional skala kecil untuk ikan tangkap serta UMKM untuk budidaya
- Kurangnya SDM untuk optimalisasi teknologi pendukung perikanan dan kelautan
- Daya dukung lintas instansi yang masih kurang
- Belum adanya kesepakatan perdagangan bebas Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya terkait sektor perikanan dan kelautan

### Threats

- Degradasi ekosistem, perubahan iklim dan cuaca ekstrem
- Penangkapan ikan ilegal dan merusak

## Strengths (Kekuatan)

Kondisi geografis Indonesia merupakan anugerah yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa ini untuk menjadi sumber kekuatan utama dalam rangka menjadi negara yang paling unggul di sektor perikanan dan kelautan. Pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di daerah tropis (iklim hangat) dengan jumlah pulau 17.504. Kepulauan tersebut menghasilkan panjang garis pantai hingga 108.000 km dan ditopang oleh luas perairan yang mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>, yang terdiri atas luas laut teritorial 0,29 juta km<sup>2</sup>, luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan 3,11 juta km<sup>2</sup>, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 3,00 juta km<sup>2</sup>. Sekitar satu pertiga spesies ikan di dunia diyakini berada di wilayah perairan Indonesia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, ikan-ikan karang, udang,

lobster, aneka ragam kerang, berbagai jenis ikan hias, dan rumput laut.

Anugerah bagi dunia maritim Indonesia tidak hanya terbatas dari luas bentang alam tetapi juga kekayaan yang terkandung di dalamnya. Data dari LIPI menyebutkan bahwa luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta ha atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia. Oleh karenanya, 70% lebih jenis karang dunia dimiliki oleh perairan Indonesia, antara lain 569 jenis dari 82 marga dan 15 suku. Di tepi pantai, Indonesia juga memiliki cakupan wilayah lamun dan mangrove yang luas. Pendataan LIPI menyebutkan bahwa saat ini luasan lamun<sup>47</sup> di Indonesia mencapai luas 293.464 ha, sedangkan luas kawasan mangrove seluas 3,5 juta ha.

47 Lamun adalah ekosistem khas laut dangkal yang ditumbuhi oleh tumbuhan rerumputan yang telah beradaptasi terhadap air asin.

Dengan bentang garis pantai yang sangat panjang, Indonesia juga memiliki puluhan ribu kampung nelayan. Berdasarkan data dari BPS, saat ini terdapat 12.857 desa yang memiliki tepian laut, atau sekitar 18% dari total desa di Indonesia yang berjumlah 71.074 (data per tahun 2018). Adapun untuk rumah tangga yang menggantung-

kan hidupnya dari budidaya perikanan, maka saat ini terdapat sekitar 1.5 juta rumah tangga seluruh Indonesia pada sektor ini. Hampir setengahnya berada pada jenis budidaya kolam (892.249), diikuti terbanyak kedua dan ketiga adalah pada jenis tambak (263.530) serta sawah/mina-padi (178.495).

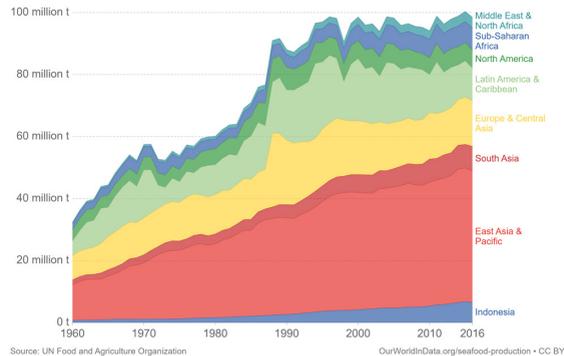
### Opportunity (Peluang secara Umum)

Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan bahwa diperkirakan potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia mencapai hingga 12,5 juta ton per tahun. Untuk mempertahankan *sustainability*, maka estimasi yang boleh ditangkap adalah sekitar 80%, yakni sekitar 10 juta ton per tahun. Sejak tahun 2000, telah terjadi kenaikan produksi perikanan tangkap, khususnya untuk perikanan laut. Terlihat dari kisaran 4 juta ton per tahun di awal tahun 2000 dan meningkat hingga mencapai sekitar 7 juta ton per tahun pada beberapa tahun terakhir. Namun demikian, bila melihat potensi ikan yang masih bisa ditangkap, sebetulnya masih terdapat gap ikan yang masih dapat dioptimalkan, bahkan estimasinya hingga mencapai 3 juta ton.

Data dari *United Nation* sebagaimana digambarkan pada grafik di samping juga menunjukkan bahwa produksi ikan tangkap Indonesia, sebagai negara dengan luas perairan yang sangat besar masih sangat sedikit dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain dengan luar perairan yang lebih sedikit. Untuk tiga dekade terakhir, asia

Capture fishery production

Capture (wild) fishery production, measured in metric tons per year.



timur dan pasifik sangat mendominasi diikuti oleh negara-negara di Eropa dan *Central Asia*. Penggunaan teknologi yang cukup tinggi untuk penangkapan ikan di kedua wilayah tersebut diyakini menjadi salah satu penyebab keteringgalan Indonesia dalam mengoptimalkan peluang potensi ikan tangkap di zona perairan tanah air.

Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Subsektor (ton), 2000-2018



### POTENSI MELIMPAH DARI MALAKA DAN ARAFURA

Sumber daya perikanan tersebar luas di seluruh wilayah perairan Indonesia



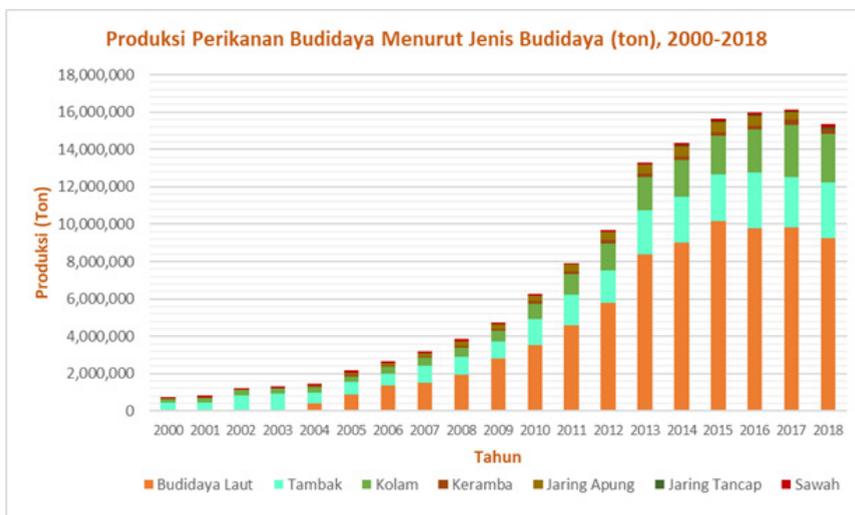
Kajian potensi tersebut sangat berkaitan erat dengan potensi melimpah ikan di perairan Indonesia sebagaimana diperlihatkan peta yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di bagian bawah ini. Terlihat di banyak titik perairan Indonesia, dari Malaka hingga Arafura diestimasi memiliki potensi sekitar lebih dari 12,5 juta ton. Oleh karena itu sangat penting mengoptimalkan peluang ini dengan tetap menjaga *sustainabilitasnya*, dalam rangka meningkatkan potensi perekonomian nasional dari sektor maritim serta menjamin ketersediaan sumber protein bagi pangan Indonesia.

Besarnya potensi ikan untuk ditangkap juga masih memberi peluang bagi daerah-daerah yang sebetulnya memiliki zona perairan tangkap yang cukup luas namun masih belum memaksimalkan potensi maritimnya tersebut. Tabel dengan data dari BPS yang diolah sebagaimana ditampilkan di samping memperlihatkan dengan cukup detail bahwa produksi ikan tangkap masih didominasi oleh Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi. Namun demikian, provinsi-provinsi lain masih sangat memiliki peluang besar untuk memaksimalkan potensi alamnya. Beberapa provinsi seperti Gorontalo, beberapa provinsi di Kalimantan, Bengkulu, dan Jambi, misalnya, masih sangat memiliki peluang besar untuk meningkatkan secara signifikan potensi alam ikan tangkap di wilayah administratif mereka. Beberapa strategi kebijakan yang disusun pada makalah ini juga akan terkait erat dengan optimalisasi peluang ini.

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Maluku	617,985	583,639	602,953	603,000
Jawa Timur	402,569	390,271	551,925	467,960
Jawa Tengah	336,047	334,298	253,614	403,028
Sulawesi Utara	257,774	302,864	393,448	368,710
Sumatera Utara	494,724	475,638	715,442	368,530
Sulawesi Selatan	318,394	295,143	332,770	339,869
Aceh	173,034	189,261	236,061	288,034
Maluku Utara	251,110	254,856	96,528	286,629
Kalimantan Selatan	170,861	176,506	188,700	250,125
Jawa Barat	271,332	218,194	231,153	248,778
Sulawesi Tenggara	146,325	185,429	229,328	238,282
Kep. Bangka Belitung	139,633	189,967	217,912	228,525
Papua	221,340	222,528	175,211	222,925
Sumatera Barat	204,771	200,610	214,144	211,821
Nusa Tenggara Barat	208,334	170,166	179,140	204,283
Papua Barat	136,393	151,587	421,840	204,180
Sulawesi Tengah	171,565	210,141	177,517	168,551
Nusa Tenggara Timur	118,391	128,931	72,226	157,691
Gorontalo	104,437	117,314	134,889	145,070
Lampung	163,384	164,420	172,277	136,750
Riau	105,298	102,101	107,843	120,022
Kalimantan Barat	136,301	113,430	128,208	112,004
Bali	104,970	102,336	111,591	109,409
Kalimantan Timur	99,940	101,718	41,041	105,970
DKI Jakarta	289,214	143,640	135,619	103,681
Sumatera Selatan	61,392	69,583	9,530	103,603
Kep. Riau	149,745	151,215	112,433	100,940
Banten	68,006	52,445	108,703	100,487
Kalimantan Tengah	100,427	123,804	67,384	87,670
Bengkulu	62,291	62,426	65,755	67,299
Sulawesi Barat	55,759	64,336	56,100	65,328
Jambi	43,204	47,134	44,410	45,609
Kalimantan Utara	15,801	16,284	12,619	32,175
DI Yogyakarta	3,918	3,254	5,315	4,897
Indonesia	6,204,668	6,115,469	6,603,631	6,701,834

Selain penangkapan ikan, sudah hampir setengah abad lamanya Indonesia melakukan kegiatan budidaya ikan, baik untuk air tawar seperti ikan mas, mujair, nila, dan lele, air laut untuk jenis ikan seperti kerapu, kakap, dan baronang, serta budidaya tambak untuk komoditas udang dan bandeng. Budidaya ikan di Indonesia dinilai cukup kuat mengingat besarnya dukungan potensi lahan perikanan budidaya yang sangat luas yang mencapai hingga 2,8 juta ha untuk lahan budidaya air tawar, 2,96 juta ha untuk lahan budidaya air payau, dan 12,12 juta ha lahan budidaya laut. Namun demikian, saat ini cakupan luas lahan untuk budidaya masih belum optimal, terlihat dari angka yang hanya mencapai 316.446 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya air tawar, 605.909 ha untuk pemanfaatan lahan budidaya tambak, dan 278.920 ha untuk

pemanfaatan lahan budidaya laut. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa terdapat kesempatan yang luar biasa besar untuk mengoptimalkan besarnya potensi lahan yang belum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan. Guna mendukung budidaya ikan, Indonesia juga memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan tepung pakan local seperti tepung maggot (ulat lalat hitam/black soldier), daging kerang hijau, ikan rucah atau ikan sisa olahan, ikan pemakan plankton yang nilai ekonominya rendah di masyarakat, bahan fermentasi berbagai tumbuhan, serta cacing *lumbricus*. Reduksi signifikan terhadap tepung pajak impor di satu sisi dan mengoptimalkan potensi tepung pakan local di sisi lainnya, tentu akan meningkatkan daya saing Indonesia baik dari sisi efektivitas maupun efisiensi.



Data produksi untuk hasil budidaya pada dasarnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada dua dekade terakhir. Di awal tahun 2000-an, produksi budi daya hanya mencapai kisaran angka di bawah satu juta ton per tahun, karena hanya di-supply oleh jenis budidaya tambak, kolam, keramba, dan sawah. Sejak tahun 2004, Indonesia mulai aktif mengembangkan budidaya laut dan jaring apung. Oleh karenanya, tidaklah mengherankan bila terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014, Indonesia juga mulai mengembangkan jaring tancap yang mulai terlihat kontribusinya terhadap produksi perikanan budidaya. Angka produksi pada tahun 2017, sebagai contoh, mencapai total hingga 16 juta ton, yang dipenuhi oleh budidaya laut dengan produksi hampir 10 juta ton, diikuti oleh tambak dan kolam masing-masing sekitar 2,7 juta ton, dan sisanya adalah untuk jenis lainnya.

## Produksi Perikanan Budidaya Menurut Provinsi (ton), 2015-2018

\*ranking volume berdasarkan tahun 2018

Provinsi	2015	2016	2017	2018
Sulawesi Selatan	3,479,420	3,564,788	3,902,808	3,551,150
Nusa Tenggara Timur	2,289,605	1,859,670	1,953,261	1,897,127
Sulawesi Tengah	1,396,701	1,341,620	971,924	1,270,551
Jawa Timur	1,093,121	1,178,593	1,189,443	1,226,560
Jawa Barat	1,075,260	1,185,041	1,160,748	1,174,357
Nusa Tenggara Barat	1,066,922	1,183,112	1,024,084	1,089,317
Maluku	725,278	604,785	817,332	670,000
Sulawesi Tenggara	994,056	912,610	1,016,382	631,232
Kalimantan Utara	316,963	532,526	472,173	593,747
Jawa Tengah	421,002	534,191	485,690	510,324
Sulawesi Utara	478,702	432,696	459,514	488,247
Sumatera Selatan	496,943	428,026	538,282	439,059
Sumatera Utara	180,635	197,681	185,012	293,442
Sumatera Barat	286,712	305,968	266,991	270,441
Kalimantan Selatan	127,152	160,901	164,715	177,852
Lampung	116,774	140,005	156,132	160,583
Kalimantan Timur	93,315	111,526	107,206	140,038
Bengkulu	74,879	81,816	115,041	122,792
Banten	105,426	107,989	142,861	121,262
Riau	87,297	92,763	110,081	115,150
Maluku Utara	42,034	255,959	74,632	105,856
Aceh	64,082	81,750	99,539	104,246
Sulawesi Barat	89,730	126,780	104,321	102,501
Kalimantan Tengah	69,330	78,428	94,346	98,152
DI Yogyakarta	69,174	77,213	88,550	95,247
Kalimantan Barat	65,266	70,730	77,970	78,349
Gorontalo	60,230	42,009	94,850	57,561
Papua Barat	40,079	54,912	56,546	56,632
Jambi	47,102	50,764	49,691	50,400
Bali	122,622	118,573	17,536	25,665
Papua	11,055	6,936	13,252	21,131
Kepulauan Riau	33,516	81,282	95,207	19,686
Kep. Bangka Belitung	4,305	4,850	3,305	9,334
DKI Jakarta	9,387	5,828	5,565	3,814
Indonesia	15,634,093	16,002,319	16,114,991	15,771,805

Untuk budidaya perikanan, tabel di atas juga memperlihatkan bahwa terdapat disparitas produksi budidaya antar provinsi yang cukup tinggi. Luasnya lahan serta iklim tropis sepanjang tahun

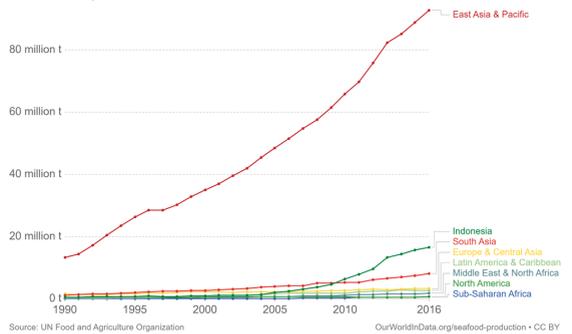
merupakan peluang luar biasa bagi Indonesia di berbagai penjurus tanah air untuk meningkatkan secara signifikan produksi budidaya perikanan.

Peningkatan sektor budidaya tersebut sangat penting mengingat untuk Indonesia, tren perkembangan produksi budidaya terlihat semakin jauh tertinggal, khususnya dari negara-negara di kawasan asia timur dan pasifik. Grafik di samping menunjukkan bahwa hingga pertengahan tahun 2000-an, Indonesia masih mengalami stagnasi, namun di satu dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Peluang Indonesia untuk terus menggenjot produksi budidaya perikanan dan kelautan sangat terbuka lebar, mengingat permintaan pasar akan semakin terus terbuka.

Peluang terakhir yang perlu disajikan adalah terkait bagaimana sektor keuangan, khususnya kredit, yang masih belum semangat menyentuh lapangan usaha perikanan. Saat ini persentase kredit yang diberikan untuk sektor perikanan pada tahun 2018 masih di bawah 1%, dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah (RD Institute, 2019). Angka tersebut sangat jauh bila diperbandingkan dengan sektor perdagangan dan industri

### Aquaculture production

Aquaculture is the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans and aquatic plants. Aquaculture production specifically refers to output from aquaculture activities, which are designated for final harvest for consumption.



pengolahan yang mencapai 25 kali lebih besar. Sektor lapangan usaha terdekat, seperti pertanian juga sudah cukup tinggi, hingga mencapai 9% dari total lapangan usaha. Masih kecilnya alokasi kredit perbankan kiranya dapat dilihat sebagai peluang, sekaligus tantangan, bagi para pelaku usaha di sektor perikanan dan kelautan.

### Opportunity (Peluang Khusus untuk Pasar Eropa)

Saat ini, merujuk pada data BPS sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah, ekspor ikan segar maupun dingin hasil tangkap masih sangat didominasi oleh negara-negara tetangga di se-

kitar Asean, khususnya Malaysia dan Singapura. Eropa tampaknya masih belum menjadi primadona bagi pasar ikan segar dan dingin dari tanah air.

#### Ekspor Ikan Segar/Dingin Hasil Tangkap menurut Negara Tujuan Utama tahun 2019

Negara Tujuan	Berat Bersih (ton)	Nilai FOB (000 US\$)
Jepang	2 265.4	12 148.8
Malaysia	28 359.8	50 970.4
Singapura	15 452.2	32 241.4
Amerika Serikat	171.0	1 641.5
Taiwan	2 311.3	8 983.1
Arab Saudi	697.8	2 506.0
Hong Kong	2 124.3	7 071.8
Tiongkok	1 874.1	6 590.3
Australia	320.8	2 064.8
Uni Emirat Arab	144.5	471.2
Lainnya	185.5	398.8
<b>Jumlah</b>	<b>53 906.7</b>	<b>125 088.1</b>

Adapun untuk ekspor rumput laut dan produk ganggang lainnya, sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini, Tiongkok masih sangat mendominasi total ekspor yang mencapai hingga

81%. Terdapat tiga negara di Eropa, yakni Prancis, Denmark, dan Spanyol yang saat ini menjadi telah menjadi negara tujuan utama ekspor rumput laut dan ganggang. Sebagaimana diketahui, rum-

put laut dan ganggang merupakan salah satu bahan baku utama untuk beberapa industri kosmetik, obat-obatan, serta olahan makanan kaya serat. Oleh karena itu, Eropa sebagai

negara yang terus mengembangkan produk olahan non-hewani (vegetarian) tentu bisa sangat dioptimalkan oleh Indonesia untuk kemajuan sektor kelautannya.

### Ekspor Rumput Laut dan Ganggang Lainnya menurut Negara Tujuan Utama, tahun 2019

Negara Tujuan	Berat Bersih (ton)	Nilai FOB (000 US\$)
 Tiongkok	155 039.8	173 601.9
 Chili	3 951.9	8 488.2
 Korea Selatan	8 042.0	8 614.7
 Hongkong	532.4	296.7
 Filipina	1 325.6	1 409.7
 Jepang	1 419.7	981.6
 Perancis	3 166.8	4 627.0
 Denmark	1 864.2	2 953.0
 Vietnam	5 998.5	2 797.2
 Spanyol	2 390.0	1 518.0
Lainnya	7 474.0	9 956.5
<b>Jumlah</b>	<b>191 204.9</b>	<b>215 244.5</b>

Dari sisi pasar, khususnya dari perspektif Uni Eropa, potensi terbesar bagi Indonesia adalah ekspor tuna, udang, dan lobster. Uni Eropa memiliki perjanjian terkait perikanan dengan negara berkembang, utamanya untuk tuna. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan tuna di Uni

Eropa cukup besar, yang semestinya dapat menjadi peluang bagi Indonesia. Selain itu, studi-studi terkait konsumen produk perikanan di Eropa juga menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen saat ini lebih menyukai untuk membeli produk-produk *frozen* (beku) atau ikan yang sudah diolah.

### 20 Negara Eksportir dan Importir terbesar untuk Produk Perikanan dan Kelautan \*angka dalam total US Dollar

EKSPORTIR	
Negara	Data Tahun 2017
China	19.903.331.845
Norway	11.245.966.830
Viet Nam	8.586.486.114
India	7.092.267.304
Chile	5.941.331.021
United States	5.649.980.179
Canada	5.089.038.317
Spain	4.225.618.304
Sweden	4.145.136.014
Netherlands	4.068.196.973
Denmark	3.986.074.103
<b>Indonesia</b>	<b>3.914.082.128</b>
Russia	3.329.589.459
Peru	2.793.945.380
Germany	2.698.671.171
United Kingdom	2.386.623.287
Poland	2.095.188.158
Japan	2.025.242.850
Iceland	2.003.303.976
Argentina	1.978.787.121

IMPORTIR	
Negara	Data Tahun 2018
United States	23.476.779.686
Japan	14.898.648.301
China	9.757.755.178
Spain	7.746.724.693
France	6.719.325.578
Italy	6.487.928.290
Germany	6.067.313.054
Sweden	5.585.603.655
Korea	5.019.651.883
United Kingdom	4.409.301.436
Thailand	3.825.844.218
Netherlands	3.204.201.314
Denmark	2.974.301.774
Canada	2.860.923.491
Poland	2.567.172.978
Portugal	2.464.612.275
Russia	2.216.739.525
Belgium	2.194.759.210
Australia	2.027.711.599
Norway	1.297.606.356

Sumber: OECD.Stat, diolah

Tabel dari yang bersumber dari data OECD di atas memperlihatkan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat 12 untuk ekspor produk perikanan dibandingkan dengan negara-negara OECD dan *selected countries* lainnya. Adapun dari sisi impor, dapat dilihat bahwa untuk OECD, dari 20 negara importir perikanan terbesar, 12 diantaranya adalah negara di Eropa total nilai impor mencapai US\$51.72 juta dollar, atau hampir mendekati 700 Triliun. Dari kondisi ini dapat dilihat bahwa pasar produk perikanan dan kelautan di Eropa sangat layak untuk dilirik sebagai peluang dalam rangka pengembangan industri maritim di Indonesia.

Dari data yang ada, terdapat hal yang menarik untuk disimak, yaitu: Indonesia konsisten sebagai negara dengan produksi hasil perikanan no 2 di dunia selama bertahun-tahun (FAO, 2018; appendix p9)<sup>48</sup>. Namun, bila kita berbicara mengenai negara eksportir hasil perikanan, maka Indonesia hanya menempati peringkat ke 12 pada tahun 2018, dan peringkat ke 15 pada tahun 2019<sup>49</sup>. Dari total produksi perikanan Indonesia, hanya 4% yang diekspor<sup>50</sup>.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas produksi yang besar serta ekspor yang belum maksimal. Pertama, tingginya rata-rata konsumsi ikan perkapita di dalam negeri yaitu 55,95 kg/kapita/tahun<sup>51</sup>, jauh melebihi rata-rata perkapita dunia sebesar 20,3 kg/kapita/tahun<sup>52</sup> (FAO, 2018; p192). Oleh karena itu, pro-

duksi perikanan dan kelautan yang cukup tinggi juga diserap oleh besarnya pasar dalam negeri. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan pada bagian kekuatan dan peluang, masih terdapat ruang potensi produksi tangkap dan budidaya perikanan dan kelautan yang belum dioptimalkan oleh Indonesia. Kedua, hasil penelitian dari Balitbang KKP menunjukkan bahwa keunggulan komparatif dari produk perikanan Indonesia masih bertumpu pada produk ikan segar. Adapun produk yang memiliki nilai tambah masih kurang memiliki keunggulan komparatif sehingga belum memiliki daya saing yang mencukupi<sup>53</sup>. Mengenai hal ini dapat dibandingkan dengan negara Vietnam yang cukup besar mengekspor ikannya yang sudah diolah. Ketiga, menurut Pakar Kelautan dan Perikanan dari IPB, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S., rendahnya ekspor perikanan dari Indonesia yang hanya menempati posisi ke 12 atau bahkan ke 15, antara lain disebabkan oleh kurangnya kuantitas produksi (sehingga harga dapat bersaing) dan rendahnya kualitas dari produk perikanan Indonesia untuk memenuhi standar ekspor. Beliau menambahkan bahwa untuk dapat memasarkan produk perikanan dan kelautan di luar negeri, termasuk Eropa, Indonesia harus bekerja keras guna memenuhi persyaratan yang diminta oleh negara-negara pengimpor. Upaya tersebut harus bersifat menyeluruh pada setiap rantai produksi, dari mulai penangkapan dan/atau budidaya, proses pengolahannya, pengemasan, rantai logistik, hingga pemasaran.

## Weaknesses (Kelemahan)

Masalah utama yang sering disampaikan oleh para ahli, salah satunya misalnya tim peneliti pada RD Institut<sup>54</sup>, mengungkap bahwa kelemahan sektor perikanan dan kelautan di Indonesia adalah dominasi yang sangat tinggi dari nelayan tradisional skala kecil untuk ikan tangkap serta

UMKM untuk budidaya. Nelayan tradisional ini dalam menangkap ikan di lautan hanya menggunakan perahu serta peralatan tangkap tradisional, sehingga kemampuan jelajah dan tonase tangkapnya relatif sangat kecil.

48 <http://www.fao.org/3/cb1213t/CB1213T.pdf>

49 <https://hisconsulting.co.id/id/ekspor-perikanan-indonesia-baru-4-persen-dari-total-produksi>

50 <https://hisconsulting.co.id/id/ekspor-perikanan-indonesia-baru-4-persen-dari-total-produksi>

51 <https://kkp.go.id/artikel/16451-2020-kkp->

52 <http://www.agri-outlook.org/commodities/Fish.pdf>

53 Saptanto, S., 2011, "Daya Saing Ekspor Produk Perikanan Indonesia di Lingkup ASEAN dan ASEAN - China, Balitbang KKP

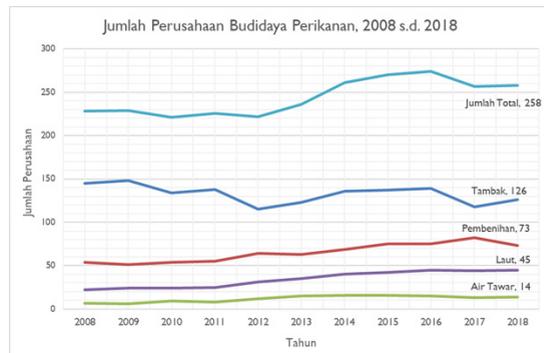
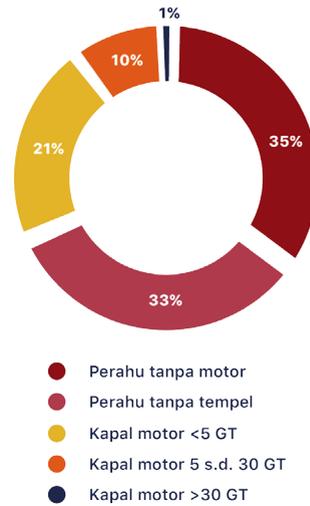
54 Rokhmin Dahuri Institute; <https://bit.ly/3ocBP1i>

Data pada grafik di samping<sup>55</sup> memperlihatkan bahwa sebagian besar (99%) nelayan Indonesia menggunakan kapal dengan ukuran < 30 GT serta *fishing gears* kurang efisien, sehingga produktivitas daya tangkap rendah. Hanya sekitar 1% nelayan di tanah air yang sudah menggunakan kapal di atas 30 GT. Kelemahan ini tentu membuka peluang masuknya perahu dan kapal dari luar Indonesia dengan kapasitas yang jauh lebih besar, mengingat selama ini nelayan Indonesia masih belum memanfaatkan potensi laut dengan perlengkapan yang mumpuni.

Kelemahan berikutnya dari tata industri perikanan adalah terkait sisi kelembagaan perusahaan penangkapan ikan. Grafik (BPS, 2019) disamping memperlihatkan bahwa hingga 2018, perusahaan penangkapan yang sudah resmi terdaftar baru mencapai 127 perusahaan, yang terdiri atas PMA sebanyak 3 perusahaan, PMDN sebanyak 88 perusahaan dan jenis lainnya sebanyak 36 perusahaan<sup>56</sup>. Kelemahan minimnya registrasi serta kelembagaan perusahaan tangkap ini tentu menghasilkan beberapa kendala, antara lain kesulitan akses terhadap perbankan untuk permodalan, termasuk optimalisasi fasilitas finansial dan perpajakan yang terus diupayakan oleh Pemerintah. Tingkat registrasi dan status kelembagaan yang masih rendah juga terjadi pada sektor budidaya. Hingga tahun 2018, baru terdapat 258 perusahaan budidaya perikanan yang secara resmi sudah terdaftar, yang terdiri atas 126 perusahaan budidaya tambak, 73 perusahaan pembenihan, 45 untuk budidaya laut, dan 14 untuk budidaya tawar (BPS, 2019). Kelemahan rendahnya status registrasi kelembagaan perusahaan di sektor budidaya juga merembet pada rendahnya kredit usaha pada lapangan usaha budidaya, termasuk menjadi halangan untuk penyaluran fasilitas dari berbagai lembaga yang menuntut status resmi perusahaan yang akan menerima bantuan.

Industri perikanan Indonesia juga masih didominasi oleh penjualan barang mentah, yang ini pun juga masih terhambat oleh kebijakan bea masuk yang belum terselesaikan dengan negara - negara pengimpor hasil laut Indonesia.<sup>57</sup>

Data Proporsi Jenis Perahu/Kapal Perikanan Laut



Kelemahan terakhir yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan adalah sedikitnya jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan memperlihatkan bahwa saat ini terdapat 538 pelabuhan perikanan. Namun demikian, berbagai temuan ahli menyampaikan bahwa kondisi pelabuhan perikanan di Indonesia masih memerlukan sentuhan serius banyak pihak guna mendukung tata niaga perikanan sehingga produk perikanan dan kelautan di Indonesia dapat menjaga kualitas produknya serta dapat memenuhi standar pengiriman yang layak secara global.

55 Dari dari Rokhmin Dahuri Institute, diolah

56 Data dari BPS, 2020, diolah

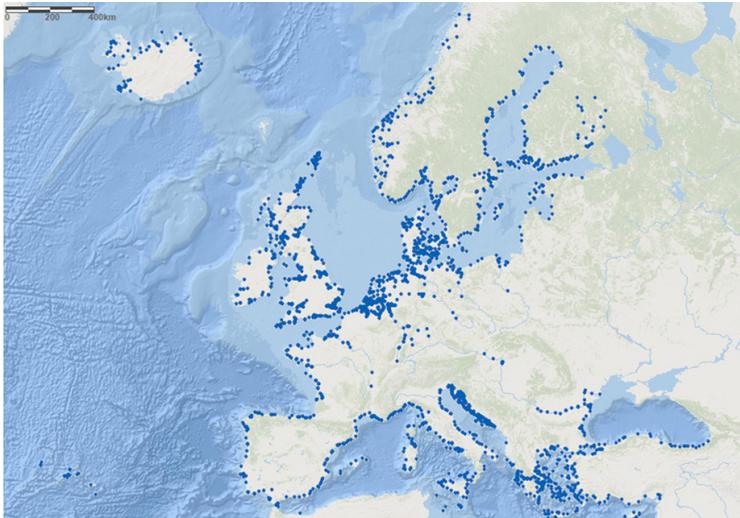
57 Mariza, N Et al, 2016, "Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional", Transformasi, TR-2016/02

Nelayan Indonesia juga kekurangan infrastruktur pendukung selain pelabuhan. Misalnya akses penyediaan kebutuhan listrik secara mencukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin, seperti *cold storage*, *air blast freezer*, *contact plate*, *ice flake machine*, dan lain-lain. Padahal lokasi produksi biasanya berada di lokasi terpencil. Pada tahun 2015, ketersediaan cold storage baru mencapai 200.000 ton/tahun, padahal kebutuhannya mencapai 1,32 juta ton/tahun, dan 1,7 juta ton/tahun di tahun 2017 mendatang. Sebagai perbandingan, di Jawa kebutuhannya mencapai 515.000 ton/tahun, namun baru tersedia sebanyak 118.000 ton/tahun. Demikian pula di wilayah Maluku dan Papua, dari kebutuhan mencapai 68.000 ton/tahun, baru tersedia sebanyak 14.000 ton/tahun.<sup>58</sup>

## 538 Pelabuhan Perikanan (PP) di Indonesia



### Peta Lokasi Pelabuhan Utama di Eropa yang Masuk pada Jaringan TEN-T<sup>59</sup>



Sebagai komparasi, Eropa saat ini sudah memiliki 329 pelabuhan besar dalam suatu kerangka jaringan besar *the transport trans-European network* (TEN-T)<sup>60</sup>. 329 pelabuhan tersebut minimal memiliki kapasitas untuk berlabuhnya kapal dan perahu dengan tonase 1.350 ton. Lebih jauh, pelabuhan-pelabuhan tersebut terkoneksi dengan baik dengan akses jalan tol, jaringan kereta api, serta konektivitas sungai besar.

Sebagai contoh, Belgia, yang luas negaranya tidak lebih besar dari Jawa Barat, saat ini memiliki tiga pelabuhan yang sangat besar antara lain Antwerpen, Gent, dan Oostende Zeebrugge. Jerman sebagai ekonomi terbesar di Eropa memiliki 20 pelabuhan. Adapun Spanyol, sebagai negara importir ikan terbesar di Eropa, saat ini memiliki 37 pelabuhan dalam jaringan TEN-T.

58 Mariza, N Et all, 2016, "Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional", Transformasi, TR-2016/02

59 Peta dapat diakses secara online pada link berikut: [https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime\\_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=78:1;c=950564.0893519893,6935472.822042013;z=6](https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/#lang=EN;p=w;bkgd=5;theme=78:1;c=950564.0893519893,6935472.822042013;z=6)

60 <https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/maritime/ports/doc/2014-04-29-brochure-ports.pdf>

## Threat (Ancaman)

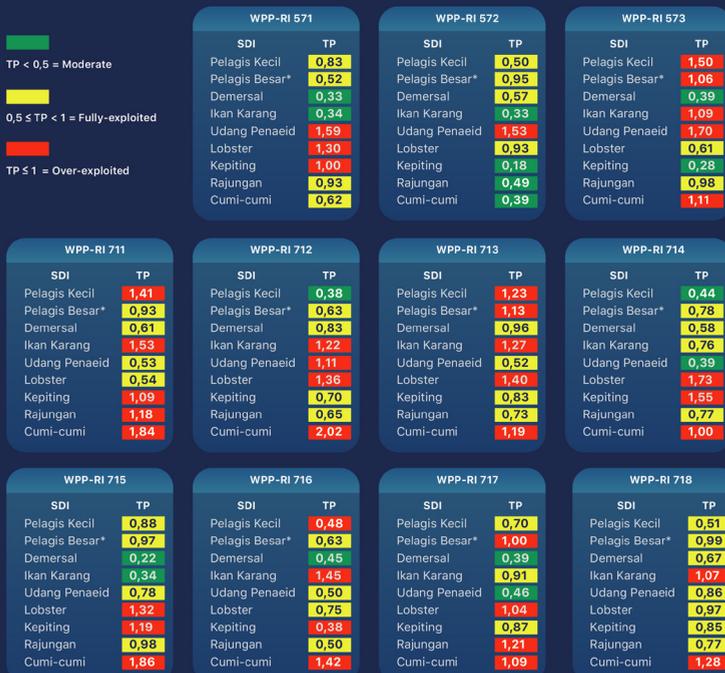
Ancaman yang terkait dengan perikanan dan kelautan di Indonesia diidentifikasi sebanyak tiga hal. Pertama, tingginya *illegal fishing* dan *destructive fishing*, khususnya oleh nelayan asing yang masih marak di perairan Indonesia. Kondisi tersebut dapat terjadi karena antara lain dua faktor. Faktor kesatu dan yang paling utama yaitu masih sedikitnya kapal Ikan Indonesia di atas >30 GT yang beroperasi di *fishing grounds* yang selama ini diarah nelayan asing. Adapun faktor kedua adalah lemahnya *law enforcement* dari aparat penegak hukum dan instansi terkait di Indonesia. Program kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sangat gencar melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal asing ilegal hingga pertengahan tahun 2019 sebetulnya cukup andil dalam mengatasi ancaman ini. Namun demikian, upaya tersebut tentu harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan penegakannya.

Ancaman yang kedua adalah status pemanfaatan potensi sumber daya ikan di perairan Indonesia yang kurang memperhatikan faktor dari keberlangsungan jangka panjang (*sustainability*)

hayati dari ekosistem ikan atau komoditas tersebut. Gambar di samping, yang bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, secara detail memperlihatkan bahwa untuk spesies tertentu sudah terjadi status over exploited (berwarna merah). Kondisi tersebut tentu menjadi ancaman bagi perikanan dan kelautan Indonesia bila tidak ada langkah dan upaya yang strategis dan terukur dari berbagai pihak, termasuk para nelayan dan pelaku industri di sektor ini.

Adapun ancaman terkait yang terkait dengan perikanan dan kelautan adalah terkait dengan perubahan iklim serta degradasi ekosistem kelautan. Sebagai contoh, dari 12.887 desa atau kelurahan maritim di Indonesia, hanya 53.1% yang memiliki hutan mangrove di pesisir wilayahnya (BPS, 2019; data PODES). Adapun dari seluruh hutan mangrove yang saat ini masih ada, 39% diantaranya teridentifikasi dalam kondisi rusak. Statistik ini hanya salah satu contoh dari beberapa indikator lainnya yang dapat menjadi ancaman jangka panjang bagi sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.

### Status Tingkat Pemanfaatan (Tp) Potensi SDI Laut Indonesia



Sumber : Kepmen-Kp No. 50/Kepmen-Kp/2017

# F

## Kebijakan Indonesia Terkait Produksi Perikanan

Sejak tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional menjadi titik tolak upaya pemerintah guna mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional.<sup>61</sup> Adapun Instruksi presiden ini memiliki 3 tujuan mendasar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan.
2. Menyerap tenaga kerja
3. Meningkatkan devisa negara.

Secara umum, kebijakan pemerintah Indonesia terkait perikanan adalah sebagai berikut :<sup>62</sup>

- Meningkatkan produksi perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
- Meningkatkan volume produk pengolahan hasil perikanan (skala UMKM dan skala besar)
- Pengendalian impor hasil perikanan
- Meningkatkan konsumsi ikan perkapita
- Mengupayakan swasembada garam
- Indonesia memprakarsai upaya pengelolaan perikanan yang sustainable, misalnya di wilayah “*coral triangle*” bersama Filipina, Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon.
- Mengidentifikasi potensi dari pulau-pulau kecil, meningkatkan pengawasan sekaligus menetapkan kawasan konservasi laut.

Secara khusus, Presiden menginstruksikan 13 langkah percepatan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, termasuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan, dan tambak garam nasional; serta menyusun peta jalan (road map) industri perikanan nasional. Berdasarkan kajian dari institusi Transformasi, tercatat setidaknya dibutuhkan koordinasi dari 25 institusi negara guna memastikan tercapainya target dari penyusunan *road map* industri perikanan nasional.

Pemerintah Indonesia juga menetapkan Kebijakan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan serta “*blue economy*”. Adapun langkah yang diambil dari kebijakan ini ialah dengan mengupayakan modernisasi sistem produksi, manajemen hulu dan hilir, guna meningkatkan nilai tambah produk dan daya saing.

Contoh dari upaya modernisasi sistem produksi, misalnya dengan manajemen hulu budidaya perikanan (udang, patin dan bandeng). Pembudidaya, selain diajarkan inovasi teknologi budidaya, juga diajarkan manajemen sumber daya ikan. Adapun esensi dari *blue economy* ialah keberlanjutan. Sebagai negara kepulauan, laut merupakan faktor dominan pembangunan. Adapun prinsip-prinsip dari ekonomi biru adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- Keberlanjutan
- Efisiensi sumber daya alam
- Meminimalkan limbah
- Kepedulian sosial

61 Mariza, N Et al, 2016, “Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional”, Transformasi, TR-2016/02

62 Sutardjo, SC, 2014, “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan”, Kementerian Kelautan dan Perikanan

63 Sutardjo, SC, 2014, “Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan”, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Adapun aspek - aspek yang dicakup dalam ekonomi biru meliputi :

- Tata kelola laut yang baik
- Pengembangan kawasan ekonomi biru
- Pengembangan investasi dan bisnis model ekonomi biru

Kebijakan nasional kelautan juga mencakup pemanfaatan sumber daya laut, berupa air dan daratan di bawah laut serta fungsinya baik di permukaan, kolom air dan landasan kontinen beserta seluruh isinya sejauh 200 mil ke laut lepas dari garis pangkal serta tambahan zona landas kontinen hingga 350 mil.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia juga mengedepankan aspek sustainability. Disamping juga meningkatkan daya saing usaha kecil di sektor perikanan. Untuk peningkatan daya saing usaha kecil lebih terlihat pada usaha budidaya perikanan, meskipun diupayakan juga untuk usaha perikanan tangkap. Bagi usaha perikanan tangkap yang masih perlu ditingkatkan ialah infrastruktur " rantai dingin", yang juga terkait erat dengan penyediaan sumber daya listrik.



## Kajian Strategi

Setelah meninjau potensi pasar perikanan Eropa beserta regulasi–regulasi yang harus dipenuhi, maka perlu dirumuskan strategi–strategi yang kiranya dapat dipertimbangkan terkait dengan kemampuan Indonesia untuk meningkatkan ekspor hasil perikanan dan kelautan ke Uni Eropa. Bagian ini akan mencoba menghadirkan beberapa rumusan strategi, baik dari sisi strategi institusi keuangan publik, optimalisasi kelembagaan komunitas, serta pembiayaan alternatif, yang kiranya dapat dilakukan guna mencapai target peningkatan produksi dan ekspor tersebut.

### Strategi 1:

### Sinergitas Otoritas Perpajakan dan Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Perikanan dan Kelautan

Sebagaimana diuraikan pada bagian kelemahan, registrasi kelembagaan perusahaan budidaya perikanan masih sangat rendah, yakni hingga tahun 2018 baru terdaftar 258 perusahaan. Adapun untuk perusahaan penangkapan, hingga 2018 baru 127 perusahaan yang sudah resmi terdaftar. Atas kondisi tersebut, usulan strategi pertama yang diusulkan adalah sinergitas otoritas institusi perpajakan dan cukai dengan lembaga pembiayaan perikanan dan kelautan, termasuk perbankan. Terdapat beberapa usulan tahapan dan inisiatif yang dapat ditempuh terkait strategi ini dengan penjelasan di bawah ini.

Pertama, dari banyak webinar yang diselenggarakan oleh beberapa pihak, terdapat kesan bahwa perusahaan–perusahaan, baik kecil, menengah, bahkan cukup besar, memiliki ketakutan dan ketidakpercayaan diri untuk mendaftarkan lembaga mereka secara legal. Program *Tax Amnesty* (amnesti perpajakan) yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI pada beberapa tahun sebelumnya kiranya dapat diduplikasi untuk diterapkan secara khusus pada sektor kelautan dan perikanan. Namun demikian inisiatif ini harus disandingkan dengan insentif kemudahan pembiayaan, khususnya dari BLU di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). LPMUKP telah menerima mandat untuk menyalurkan permodalan dana bergulir yang cukup besar dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan tangkap dari sektor kelautan dan perikanan. Namun di sisi lain LPMUKP juga mengalami kendala terkait sangat rendahnya status legalitas para

pengusaha di sektor kelautan dan perikanan. Atas kondisi tersebut, institusi perpajakan dan cukai dapat hadir dengan membantu para pengusaha di sektor ini untuk mendaftarkan usahanya, bukan dalam rangka penegakan hukum, namun lebih kepada sisi pelayanan. Bahkan, sangat perlu untuk menggaungkan lebih massif lagi berbagai fasilitas insentif dari pemerintah untuk sektor kelautan dan perikanan dari sisi perpajakan dan cukai yang mungkin selama ini belum diketahui para pelaku usaha, atau lebih jauh bahkan mungkin menakuti mereka karena banyaknya informasi tidak akurat.

Berbagai literatur terkait penerimaan negara menyebutkan bahwa *compliance* (kepatuhan) merupakan hasil kombinasi persamaan *service* (pelayanan) ditambah *law enforcement* (penegakan hukum). Di sini terlihat bahwa pelayanan merupakan fungsi pertama dan yang paling utama untuk mencapai tingginya kepatuhan. Adapun penegakan hukum bertindak sebagai fungsi tambahan bila melalui pelayanan kepatuhan belum tercapai atau terdapat penghindaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya pendekatan registrasi perusahaan dalam rangka pendaftaran legalitas, disertai dorongan informasi insentif serta kemudahan akses pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan pendataan dari pengusaha dan perusahaan di sektor kelautan dan perikanan. Adanya akurasi pendataan tentu akan mempermudah fungsi pemantauan, sehingga berbagai upaya tambahan dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi dan tangkapan komoditas perikanan para pengusaha dapat secara tepat dirumuskan dan diterapkan di lapangan.

Selain itu, perbaikan dari pendataan dari sisi perpajakan dan cukai terhadap para pelaku di sektor kelautan dan perikanan diharapkan dapat meningkatkan gairah sektor sektor keuangan, dalam hal ini lembaga pembiayaan dan perbankan untuk secara serius menggarap sektor ini. Saat ini persentase kredit yang diberikan untuk sektor perikanan pada tahun 2018 masih di bawah 1%, dengan nilai kurang lebih sekitar 11 triliun rupiah. Pendataan kelembagaan perusahaan, khususnya dari sisi pendaftaran legalitas termasuk untuk perpajakan dan cukai, tentu dapat meningkatkan kepercayaan dari perbankan untuk semakin meningkatkan kucuran kreditnya pada sektor ini. Lebih jauh, beberapa perusahaan pembiayaan digital yang telah resmi terdaftar (financial technology - fintech) juga secara perlahan akan masuk sektor ini. Sinergitas berbagai instansi ini, yang menaikkan angka kredit secara formal, juga diharapkan dapat mereduksi secara signifikan

pembiayaan non-formal (rentenir) yang selama ini sangat merugikan para nelayan di lapangan.

Terakhir, mengingat desa nelayan, khususnya di Indonesia bagian timur didominasi etnis tertentu yang beragama Islam, maka pendekatan syariah juga dapat diterapkan dari lembaga pembiayaan. LPMUKP misalnya saat ini sudah menyediakan layanan pembiayaan dana bergulir syariah antara lain *nisbah* mudharabah, *ujroh* untuk pembiayaan ijarah, termasuk margin untuk pembiayaan murabahah. Pendekatan kultural dan syariah akan semakin memperkuat pembiayaan formal bagi nelayan sehingga dapat terhindar dari rentenir. Pelayanan perpajakan dan cukai dapat hadir dalam rangka membantu mereka dari sisi formalitas perpajakan dan legalitas perusahaan dalam mengakses pembiayaan tersebut.

## Strategi 2:

### Sinergitas Pengembangan Kawasan terkait Pengembangan Industri Terpadu Perikanan dan Kelautan

Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, serta berada pada posisi strategis untuk jalur pelayaran internasional, belum sepenuhnya kompetitif khususnya dari sisi daya dukung infrastruktur pelabuhan. Saat ini sudah terdapat 538 pelabuhan perikanan, namun masih banyak yang belum beroperasi sesuai dengan kebutuhan rantai pasok industri perikanan. Strategi kedua yang diusulkan dalam makalah ini adalah perlunya fokus akselerasi revitalisasi dan pembangunan baru Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) dan Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebagai kawasan industri perikanan terpadu yang terkoneksi dengan infrastruktur logistik yang lain seperti bandara, jalan tol, dan rel kereta api.

Dari sisi lokasi, Pemerintah selaku penentu penetapan lokasi pelabuhan dapat memfokuskan pengembangan di wilayah-wilayah terdepan NKRI sekaligus lumbung ikan seperti Natuna, Miangas, Morotai, Sorong, dan Kupang, atau wilayah NKRI lainnya sesuai kebutuhan. Penentuan lokasi pelabuhan PPS maupun PPN sebagai kawasan industri pengolahan perikanan terpadu yang paling utama tentu harus mempertimbangkan pasokan *raw materials* dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Namun demikian, sangat perlu mengevaluasi rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk mengevaluasi konektivitas dari *supply* bahan baku dengan kecepatan pengiriman menuju konsumen. Sebagai contoh, penting untuk mempertimbangkan pelabuhan perikanan untuk bisa terkoneksi langsung dengan bandara dan jalan tol. Hal tersebut diperlukan mengingat untuk ikan jenis tertentu, misalnya tuna segar, sangat diperlukan kecepatan pengiriman yang hitungannya jam demi menjaga kualitas kesegaran ikan. Kecepatan pengiriman tersebut selain berbanding lurus dengan kualitas kesegaran ikan juga berbanding terbalik dengan harga. Semakin kecil (singkat) waktu pengiriman, maka semakin tinggi harga yang akan ditetapkan oleh pembeli. Oleh karena itu, di beberapa wilayah tertentu, yang memiliki komoditas ikan segar, maka konektivitas dalam RTRW antara pelabuhan perikanan dengan bandara menjadi kunci keberhasilan industri sektor perikanan.

Selain itu, bila kita mengadopsi *guideline* untuk *the transport trans-European* (TEN-T) network, maka salah satu karakteristik pelabuhan besar di Eropa adalah konektivitas dengan jaringan sungai besar yang juga bisa dilintasi oleh kapal-kapal besar. Oleh karenanya, di beberapa

wilayah di tanah air yang memiliki sungai besar, potensi tersebut kiranya bisa dioptimalkan dalam mendukung pelabuhan perikanan. Hal tersebut diperlukan guna mendukung perikanan sektor budidaya yang tren-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Selain itu, ikan hasil budidaya juga semakin dipermudah terkait sertifikasi *sustainability*-nya, sehingga bisa menjadi salah satu faktor pendorong ekspor ke pasar perikanan di Eropa.

Di Indonesia, peraturan tata ruang terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan tata ruang nasional, perencanaan tata ruang provinsi, dan perencanaan tata ruang kabupaten atau kota. Untuk perencanaan tata ruang tingkat nasional jangka waktu perencanaan cukup panjang, yaitu 20 - 30 tahun. Peninjauan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Perencanaan tata ruang nasional ini berwenang menentukan penataan kawasan strategis nasional, serta memastikan sinergi perkembangan antar wilayah provinsi serta keserasian antar sektor.

Perencanaan tata ruang provinsi wajib mengacu pada kebijakan perencanaan tata ruang nasional. Dimana dalam hal ini, ketika pemerintah pusat sudah menentukan bahwa provinsi tersebut menjadi salah satu kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang di provinsi tersebut wajib memprioritaskan kebijakan dari pemerintah pusat sambil berkoordinasi dengan provinsi-provinsi di sekitarnya guna menghasilkan kebijakan tata ruang yang saling mendukung satu sama lain. Dalam hal ini, provinsilah yang berwenang untuk menetapkan kawasan strategis nasional yang telah ditentukan dalam perencanaan tata ruang nasional. Setelah ditetapkan oleh provinsi, maka pihak pemerintah daerah tingkat II mengimplementasikan ketetapan dari tingkat provinsi tadi ke dalam rencana detail / rinci kawasan strategis nasional tadi.

Kawasan-kawasan provinsi terluar NKRI sudah ditetapkan sebagai kawasan strategis industri perikanan, namun demikian masih terdapat hambatan-hambatan sehingga pembangunan infrastruktur pendukung industri perikanan ini masih belum terwujud. Ada berbagai faktor yang harus diperbaiki, terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dari kawasan strategis terkait hal ini.

Diantaranya terkait prioritas. Tidak jarang, provinsi terluar yang menjadi lumbung ikan ini juga menjadi prioritas nasional untuk pengembangan hal yang lain di luar pengembangan industri perikanan. Sehingga terdapat produk hukum yang lain, yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RTRW. Tidak jarang, hal ini menimbulkan tumpang tindih dan kerancuan mengenai produk hukum yang mana yang dipandang paling tinggi untuk menjadi acuan penyusunan RTRW provinsi. Untuk itu disarankan agar Pemerintah pusat selaku penyusun dari Rencana Tata Ruang nasional memberikan arahan yang jelas mengenai hal ini. Di sisi lain, ketika sudah ada kejelasan dari pihak pemerintah pusat, maka pemerintah provinsi harus bergerak cepat menetapkan kawasan strategis provinsi, untuk kemudian dapat segera diikuti oleh pemerintah daerah tingkat II yang memiliki kewenangan untuk menyusun rencana detail penataan kawasan tersebut. Peran provinsi dalam hal ini sangat penting, mengingat lokasi infrastruktur penunjang industri (tidak hanya industri perikanan) dapat terpecah pada lebih dari 1 daerah tingkat II.

Rencana Tata Ruang di Indonesia, penyusunannya diwajibkan menyertakan masyarakat. Untuk pengembangan industri perikanan maka yang dimaksud masyarakat dalam hal ini adalah komunitas nelayan setempat beserta pihak swasta yang dapat membantu pengembangan infrastruktur industri perikanan. Amanat ini juga sejalan dengan visi Uni Eropa yang menekankan peran serta masyarakat dalam pengembangan industri perikanan. Namun demikian, dalam penyusunan RTRW yang sering terjadi ialah pelibatan masyarakat/komunitas nelayan hanya sekedar diundang pada acara sosialisasi penyusunan RTRW, dicatat pendapatnya, namun kemungkinan suara komunitas turut mempengaruhi isi RTRW yang disusun tidak terlalu signifikan. Peran masyarakat yang dapat lebih signifikan dalam hal ini ialah suara dari kelompok pengusaha atau investor. Hal ini juga harus diperhatikan dalam evaluasi RTRW agar supaya program nasional tetap menjadi prioritas, sembari memperhatikan kepentingan masyarakat kecil dan tidak dikendalikan oleh kepentingan investor semata.

**Strategi 3:**

**Kapal Tangkap untuk BUMDes Sektor Kelautan**

Rekomendasi kebijakan kami yang ketiga disampaikan dalam rangka mengatasi permasalahan keterbatasan kapasitas daya tangkap nelayan Indonesia yang masih tradisional dan 99% dari mereka menggunakan kapal dengan ukuran <30 GT dengan *fishing gears* kurang efisien. Namun demikian, mereka juga memiliki kendala permodalan karena kapal di atas 30 GT akan menghabiskan modal di atas 3 hingga 5 milyar rupiah. Di samping itu, mayoritas unit usaha juga bukan perusahaan yang memiliki legalitas lengkap dan terdaftar di otoritas perpajakan dan cukai, sehingga semakin sulit mendapatkan pembiayaan dari perbankan.

Namun demikian, dari kajian SWOT, kami menemukan bahwa berdasarkan data dari BPS saat ini terdapat 12.857 desa yang berada di tepi laut dan sebagian dari mereka berstatus sebagai desa nelayan. Di sisi lain, Pemerintah juga sedang menggalakkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mengakselerasi pertumbuhan perekonomian berbasis potensi lokal desa. Selain itu, pengelolaan BUMDes yang baik juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), sehingga secara institusi desa bisa semakin mandiri.

Kami melihat bahwa dari sisi sumber daya manusia, para nelayan di tanah air memiliki kemampuan melaut yang sangat baik, terbukti meskipun hanya dengan perlengkapan tradisional mereka bisa menangkap ikan di perairan sesuai daya je-

lahaj perahu mereka. Keunggulan sumber daya tersebut bila didukung dengan perahu yang besar serta peralatan tangkap yang baik maka akan menjadi kombinasi kapasitas yang potensinya tinggi. BUMDes dapat dioptimalkan sebagai perusahaan pemilik kapal di atas 30 GT sekaligus pengayom dari para nelayan yang menjadi binasaan serta warga desa setempat. Sebagai institusi bisnis legal di bawah naungan instansi desa, BUMDes dapat jauh lebih mudah untuk mengakses permodalan dalam rangka pengadaan kapal besar, baik melalui perbankan, LPMUKP, maupun institusi keuangan lainnya. Selain permodalan untuk pembelian kapal, BUMDes juga sebaiknya mendaftarkan modal kapalnya tersebut, termasuk sumber daya manusianya, ke lembaga asuransi guna mengantisipasi beberapa kerugian yang dapat terjadi di masa mendatang. Asuransi ini, baik barang modal, kesehatan, maupun jiwa, dapat menghindarkan BUMDes dari kehilangan total akibat harus menanggung kerugian yang terjadi.

Dengan adanya pengadaan kapal bertonase besar di atas 30 GT oleh BUMDes di desa-desa pesisir, diharapkan kemampuan daya jelajah nelayan tanah air akan meningkat secara signifikan. Keberadaan BUMDes sebagai penaug nelayan akan juga membawa kesejahteraan secara kolektif dalam satu desa, sehingga peningkatan kesejahteraan nelayan akan jauh lebih merata dibandingkan bila pengadaan kapal tersebut bersumber dari modal perseorangan atau perusahaan privat.

**Strategi 4:**

**Pengembangan Budidaya Ikan Tuna**

Konsumsi ikan serta produk laut saat ini di Eropa mencapai hingga 24 kg/kapita per tahun. Dari konsumsi tersebut, secara mengejutkan konsumsi tertinggi adalah jenis ikan tuna yang sebagian besar yang sudah berbentuk dikalengkan (*canned*). Secara lebih detail, berikut disajikan data konsumsi ikan per kapita per tahun di Eropa:

**Konsumsi Jenis Ikan Per Kapita Per Tahun di Eropa**

Jenis Produk	Per capita (kg)	% wild	% farmed
Tuna (mostly canned)	3.07	99%	1%
Cod	2.31	100%	0%
Salmon	2.24	0%	100%
Alaska pollock	1.59	100%	0%
Shrimps	1.51	51%	49%
Mussel	1.28	8%	92%
Herring	1.18	100%	0%
Hake	0.94	100%	0%
Squid	0.67	100%	0%
Mackerel	0.65	100%	0%

Sumber: Eumofa, The EU fish market, 2019 edition.

Indonesia sebagai penangkap dan produsen ikan tuna terbesar di dunia tentu harus mengoptimalkan data konsumsi tuna tersebut di atas. Namun demikian, kebijakan perikanan Eropa yang secara terus-menerus mendorong budidaya juga harus disiasati dengan cermat oleh Indonesia. Strategi ke-4 yang kami usulkan pada makalah ini adalah perlunya dorongan dan upaya serius pengembangan budidaya ikan tuna di Indonesia.

Tabel pada halaman 25, menempatkan Norwegia sebagai eksportir terbesar kedua secara global. Norwegia dapat unggul pada sektor ini bukan bergantung pada sisi penangkapan tetapi dari sisi budidaya khususnya ikan salmon yang merupakan spesies yang menjadi unggulan negeranya. Tantangan budidaya salmon dengan siklus hidupnya yang cukup rumit dapat ditaklukkan dengan sinergi tripartit antara pemerintah selaku regulator, lembaga penelitian untuk pengembangan, serta pelaku usaha sebagai eksekutor industri. Indonesia dengan modal kuat ikan tuna serta iklim tropis dan luasnya lahan tentu memiliki peluang besar mengembangkan budidaya tuna sebagaimana yang sudah diupayakan saat ini. Saat ini tuna *aquaculture* atau *fattening* telah

serius dikembangkan di banyak negara dan produsen terbesar di dunia saat ini yaitu Spanyol, Kroasia, dan Malta. Beberapa negara lainnya yang juga mengembangkan budidaya tuna antara lain Yunani, Italia, Maroko, Portugal, Tunisia, dan Turki. Angka produksi budidaya tuna mengalami peningkatan cukup signifikan dari hanya sekitar 421.000 ton di tahun 1998 hingga menjadi 7 juta ton di tahun 2017. Kondisi ini tentu harus disikapi serius oleh Indonesia sebagai penangkap tuna terbesar di dunia bila sewaktu-waktu, karena alasan keberlangsungan ekosistem, tuna hasil tangkap dari alam akan ditolak pasar. Oleh karenanya, pengembangan budidaya tuna harus menjadi strategi yang digarap bersama-sama, lintas institusi dan sektor, di Indonesia.

Untuk pengembangan budi daya ikan, pemerintah Indonesia telah berketetapan untuk meningkatkan peran UMKM. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan tidak hanya akses UMKM terhadap permodalan, maupun teknologi budi daya dan teknologi industri pengolahan hasil budi daya perikanan, namun juga pelatihan managerial dan pemasaran bagi para pelaku usaha (UMKM).

### Strategi 5:

#### Optimalisasi Sumber Pembiayaan Alternatif untuk Inisiatif Konservasi Sustainability Perikanan dan Kelautan

Salah satu ancaman serius yang cukup membahayakan keberlangsungan jangka panjang sektor perikanan dan kelautan adalah pemanasan global serta kerusakan lingkungan ekosistem. Bahkan, di beberapa wilayah Indonesia kerusakan terumbu karang serta kenaikan permukaan air laut sudah terjadi pada beberapa tahun terakhir. Indonesia sebagai negara yang terdampak langsung oleh perubahan iklim global harus bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk mereduksi emisi karbon serta memitigasi kerusakan lingkungan secara dini.

Bila seluruh mitigasi kerusakan lingkungan hanya mengandalkan APBN, APBD, serta dana dari BUMN/D, maka tentu terdapat batasan ruang fiskal mengingat besarnya cakupan berbagai sektor yang harus diayomi oleh Pemerintah. Salah satu peluang yang dapat diambil antara lain

adalah inisiatif program dan kegiatan yang secara langsung dapat mereduksi emisi karbon sehingga dapat memperoleh pembiayaan dari berbagai lembaga, salah satunya *Green Climate Fund (GCF)*<sup>64</sup>. GCF merupakan sumber pembiayaan terbesar di dunia yang dikelola oleh *the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* yang berfokus pada proyek mitigasi perubahan iklim.

Atas dasar tersebut, mengingat Indonesia, khususnya masyarakat nelayan dan pesisir, merupakan negara yang terdampak langsung oleh perubahan iklim, maka banyak sekali program dan inisiatif yang dapat selaras dengan misi GCF. Lebih jauh, bila proyek yang dikerjakan digabungkan dengan proyek padat karya yang mengikutsertakan nelayan guna menyediakan mata pencaharian alternatif, khususnya ketika

64 Lebih detail tentang GCF dapat diakses melalui link berikut ini: <https://www.greenclimate.fund/about>

musim paceklik ikan dan cuaca buruk, maka kemungkinan persetujuan akan semakin lebih tinggi. Indonesia telah memiliki proyek yang sudah disetujui dengan pendanaan dari GCF antara lain untuk pemulihan hutan dan alih fungsi lahan. Oleh karenanya sangat perlu dirumuskan proyek yang terkait dengan pemulihan ekosistem laut, seperti penyelamatan terumbu karang serta kawasan mangrove yang akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan perikanan dan kelautan dalam jangka panjang.

GCF hanyalah salah satu contoh unit pembiayaan yang dapat diakses dalam rangka pendanaan upaya konservasi guna menjaga *sustainability* lingkungan, termasuk untuk sektor perikanan dan kelautan. Sinergitas berbagai pihak untuk merumuskan proyek serta akuntabilitas dalam eksekusi pelaksanaan kegiatan, khususnya dari gangguan korupsi, sangat diperlukan. Hal tersebut tidak saja untuk pengaliran pembiayaan pembangunan, namun lebih jauh sebagai upaya konservasi alam untuk jangka panjang dengan tidak terlalu membebani ruang fiskal keuangan negara.

Terkait dengan GCF, Uni Eropa juga memiliki program serupa terkait perikanan, di mana Uni Eropa membantu mendanai negara - negara yang terikat perjanjian dengan Uni Eropa untuk mengembangkan perikanan yang sustainable. Barangkali peluang ini dapat dijangkau oleh pemerintah Indonesia dalam perundingan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa.

Opsi lain untuk sumber pembiayaan alternatif bagi konservasi sustainability perikanan dan kelautan dapat melibatkan pengusaha atau investor besar yang terlibat dalam kegiatan budidaya perikanan. Bagi mereka yang diberikan konsesi khusus terkait hal ini, dapat diwajibkan untuk turut membiayai usaha konservasi sebagai timbal balik konsesi yang diberikan.

# H

## Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Uni Eropa merupakan pasar produk perikanan yang terus berkembang. Di mana di Uni Eropa sendiri, sekalipun menunjukkan peningkatan konsumsi produk perikanan perkapita, namun di saat yang sama Eropa mengalami penurunan dalam produksi hasil perikananannya. Selain masalah-masalah internal terkait pengelolaan sumber daya yang terbatas, saat ini Uni Eropa sedang mengalami permasalahan yang dapat berimbas pada produksi hasil perikananannya. Adapun permasalahan tersebut diantaranya terkait merebaknya pandemi covid19 serta BREXIT.

Terkait dengan trend pasar perikanan Eropa, Indonesia sebagai negara produsen produk perikanan nomor 2 di dunia tentunya berpeluang untuk memenuhi sebagian dari permintaan pasar produk perikanan di Eropa. Namun tentunya hal ini tidak lepas dari kendala, misalnya masih belum tercapainya titik temu dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dengan Uni Eropa. Dengan situasi ini, maka produk perikanan Indonesia masih terkendala dengan bea masuk, yang mana menjadikan produk Indonesia jadi kurang dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

Strategi yang dipaparkan dalam kajian ini mencoba untuk mengurangi dampak kurangnya daya saing produk perikanan Indonesia di pasar Uni Eropa. Yang mana salah satu hal yang perlu digaris bawahi adalah masalah sinergi antar institusi dan kebijakan-kebijakannya. Selain strategi yang mendukung pelaku usaha dalam bidang produksi perikanan, terlebih khusus para nelayan. Serta strategi pembiayaan yang dapat membantu kebijakan pemerintah Indonesia terkait perikanan yang berkelanjutan.

Namun demikian, kajian ini masih sangat terbatas serta perlu dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, dalam kajian ini dibahas mengenai potensi pasar ikan tuna dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk ikan tuna Indonesia. Sedangkan potensi pasar di Uni Eropa tidak hanya tuna, melainkan juga udang. Dibutuhkan kajian yang lebih mendalam, spesifik terkait dengan komoditas yang hendak diperdagangkan, serta negara yang menjadi target pemasaran. Selain itu perlu juga kajian lain yang lebih mendalam mengenai strategi pemasaran produk perikanan Indonesia di dalam wilayah Uni Eropa. Misalnya kampanye mengenai budi daya perikanan Indonesia yang sustainable, atau pengenalan produk-produk unggulan dari hasil laut dan budidaya perikanan Indonesia. Tentunya kajian ini harus disesuaikan juga dengan karakter masing-masing negara anggota Uni Eropa.

## Daftar Pustaka

1. AIPCE, 2020, "Initial Impact Assessment of COVID-19 on the Fish Processing and Trade Sector" Brussels
2. Aps, R, et all, 2004, "Freshwater Fisheries in Central & Eastern Europe: the Challenge of Sustainability", IUCN, Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, Warsaw
3. Bartelings, H. & Kristkova, Z. S., 2018, "Impact of hard Brexit on European fisheries; Scenario analysis using the MAGNET model". Report. Wageningen University and Research
4. Black, Richard , 2010. "'Profound' decline in fish stocks shown in British records". BBC News. Retrieved 5 May 2010.
5. Booker, C , 2007 "Fishing quotas are an ecological catastrophe". The Daily Telegraph. London
6. Commission Staff , 2013, "Guidance document on the implementation of Chapter II "Professional Organisations" of Regulation (EU) No 1379/2013 establishing a common organisation of the markets in fishery and aquaculture products, Brussels
7. COUNCIL REGULATION (EU) 2018/1977, 2018, "opening and providing for the management of autonomous Union tariff quotas for certain fishery products for the period 2019–2020", ST/14460/2018/INIT
8. Eirikur, B, 2017, "Iceland: Ever-Lasting Independence Struggle". Nordic Nationalism and Right-Wing Populist Politics. Palgrave Macmillan UK. pp. 93–124
9. EU, 2011, "EU Report on the implementation of measures pertaining to the protection of vulnerable marine ecosystems from the impact of bottom fishing on the high seas in UNGA Resolution 61/105 of 2006 and UNGA Resolution 64/72 of 2010, Brussels
10. EU, 2019, "EU fisheries in the North East Atlantic, North Sea and Baltic Sea line with maximum sustainable yield (MSY)"
11. EU, 2019, "Fishing Areas in the EU"
12. EU, 2019, "Fishing Areas in the Baltic Sea"
13. EUMOFA, 2017, "Final Report : EU Consumer Habits Regarding Fisheries and Aquaculture Product", ISBN: 978-92-79-69463-9 DOI: 10.2771/758623
14. EUMOFA, 2017, "Cooked Shrimps in France : Price Structure in the Supply chain", Brussels
15. FAO. 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. <https://doi.org/10.4060/ca9229en>
16. Horn, et all, 2009. "Beyond the WTO? An Anatomy of EU and US Preferential Trade Agreements," CEPR Discussion Papers 7317, C.E.P.R. Discussion Papers
17. KKP – Republik Indonesia, 2019, "Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan s/d Agustus 2019", Jakarta
18. Knottnerus, R, et all, 2018, "The EU – Indonesia CEPA negotiations Responding to calls for an investment policy reset: are the EU and Indonesia on the same page?, Published by SOMO, TNI, IGJ
19. Mariza, N Et all, 2016, "Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional", Transformasi, TR-2016/02
20. Prieto-Sandoval, et all , 2016,. "ECO-labels as a multidimensional research topic: Trends and opportunities". Journal of Cleaner Production. 135: 806–818 doi:10.1016/j.jclepro.2016.06.167
21. Sutardjo, SC, 2014, "Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ke Depan",

Kementerian Kelautan dan Perikanan

22. Varadi et al, 2000, "Aquaculture Development Trend in Europe", Fish Culture Research Institute, Szarvas
23. Vella, K, 2016, "Fishery and Aquaculture Products, an Overview of EU Consumer Habits, Brussels
24. <https://www.statista.com/statistics/1083946/indonesia-fisheries-contribution-to-gdp/#:~:text=In%202018%2C%20fisheries%20and%20the,largest%20fish%20producer%20after%20China.>
25. <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/>
26. <https://www.cbi.eu/market-information/fish-seafood/what-demand#:~:text=With%20the%20increasing%20demand%20for,2017%2C%20reported%20at%20%243.1%20billion.>
27. <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international>
28. <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information>
29. <https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/>
30. [https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal\\_fishing\\_en](https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing_en)
31. [https://www.wwf.eu/what\\_we\\_do/water/?uNewsID=364693.](https://www.wwf.eu/what_we_do/water/?uNewsID=364693)

# Tentang Penulis

## ● **Kezia Eka Sari Dewi, S.T., Ma.H.S.**

Penulis merupakan alumni Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro. Selain menjadi dosen dari Universitas Kepulauan Riau, penulis juga berprofesi sebagai arsitek, *urban planner*, dan tenaga ahli / konsultan bagi pemerintah Kota Batam dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2006 s.d. 2013. Pada tahun 2013 s.d. 2014, penulis mendapatkan beasiswa penuh dari VLIR-UOS / Pemerintah Belgia untuk belajar di program *Master of Human Settlements* di KU Leuven. Sedangkan saat ini, penulis sedang menyelesaikan pendidikan Doktor di jurusan *Architecture and Urbanism*, KU Leuven dengan beasiswa penuh dari LPDP, sub cluster: Kebijakan Publik.

Adapun pengalaman profesional penulis tidak hanya dalam bidang arsitektur namun juga dalam bidang penataan kota serta proyek-proyek kajian terkait pelabuhan perikanan internasional di pulau Batam, proyek pengembangan pelabuhan Tanjung Pinang oleh PT Pelindo 2, serta proyek - proyek kajian permukiman tepi pantai dari permukiman nelayan hingga resort di Lagoi, pulau Bintan. Terkait dengan riset mengenai permukiman nelayan Muara Angke, penulis pernah mendapatkan nominasi paper dari *Cities Alliance* pada tahun 2014. Pada tahun 2015, penulis bekerja sebagai asisten peneliti di *Future Cities Laboratory* - ETH Zurich - NUS dalam penelitian mengenai kawasan Malaysia - Singapura - Indonesia, yang menitik beratkan pada kebijakan penataan ruang dan pengaruhnya terhadap kawasan tersebut. Adapun penelitian yang secara langsung ditangani oleh penulis ialah penelitian "Riau project" - didanai oleh SHELL Company, mengenai perkembangan permukiman - permukiman di pulau Batam.

## ● **Anton Abdul Fatah, S.A.B., M.P.A.**

Penulis merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta dan mengabdikan di Kementerian Keuangan dari tahun 2005 s.d. 2014. Pada tahun 2012, penulis menyelesaikan program sarjana dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, dengan bidang konsentrasi Manajemen Ekonomi Publik. Pada tahun 2014 s.d. 2016, penulis menjalani pendidikan *Master of Public Administration (MPA)* dengan beasiswa penuh dari Fulbright (Pemerintah Amerika Serikat) di *Martin School of Public Policy and Administration at the University of Kentucky, USA*. Saat ini penulis sedang menjalani pendidikan Doktor dengan beasiswa penuh dari Pemerintah Belgia, VLIR-UOS scholarship, di KU Leuven University.

Penulis telah meraih beberapa penghargaan antara lain sebagai *the First Winner of the E-IDEA Asia Pacific Competition by British Council & LRQA* pada tahun 2011, yang proyeknya berfokus pada rehabilitasi lahan pertanian yang rusak akibat industri batu bata di Garut, Jawa Barat. Ide dan inovasi pada proyek tersebut juga mengantarkan penulis meraih *Indonesia Young Muslim Creation Award* pada bulan Juli tahun 2012 dari ITB. Pada tahun yang sama penulis juga terpilih untuk menjadi *the Global Champion in "What is Out There?" Competition* yang diselenggarakan oleh *Saudi Spanish Center for Islamic Economics and Finance (SCIEF)*, di Madrid, Spanyol. Ketika menjalani kuliah master di USA, penulis juga berhasil menjadi *the First Winner South Eastern Conference USA Policy Challenge 2015* yang fokus pada formulasi kebijakan mengatasi masalah ketersediaan air di Amerika Serikat. Di tingkat nasional pada tahun yang sama, di Washington DC, penulis meraih peringkat 2nd Champion. Penulis juga selama dua tahun berturut-turut (2015 dan 2016) terpilih sebagai penerima fellowship dari *Clinton Global Initiative - University (CGI-U) dari the Clinton Foundation*.





Embassy of  
the Republic of Indonesia  
in Brussels